



**POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI PASAR TANJUNG
KABUPATEN JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014**

***THE POTENCY OF MARKET RETRIBUTION INCOME IN THE MARKET OF
PASAR TANJUNG KABUPATEN JEMBER EAST JAVA IN PERIODE 2014***

SKRIPSI

Oleh

**Pipit Ila Kartika Sari
NIM 100910201070**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



**POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI PASAR TANJUNG
KABUPATEN JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014**

***THE POTENCY OF MARKET RETRIBUTION INCOME IN THE MARKET OF
PASAR TANJUNG KABUPATEN JEMBER EAST JAVA IN PERIODE 2014***

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

**Pipit Ila Kartika Sari
NIM 100910201070**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah dengan bangga karya skripsi ini saya persembahkan:

- * Orang tuaku tercinta, Ayahanda Bapak Pariyono dan Ibunda Rusmi yang tidak henti-hentinya selalu mendoakan dan memberikan semangat serta kasih sayang selama ini;
- * Adikku Rif'an Choirony, terima-kasih atas doa dan dukungannya selama ini;
- * Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
- * Almamater yang saya banggakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

Kemarin adalah kenangan, dan besok adalah harapan. Tapi yang paling penting, hari ini adalah kenyataan yang harus dijalani dengan sebaik-baiknya.

(Merry Riana)¹

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

(Surat Al Insyirah: 6-8)²

1 <http://assonhaji.blogspot.com/2013/07/kata-kata-bijaksana.html>

2 <http://darussalam-online.com/kajian/sabtu-malam/hikmah-dari-surah-al-insyirah/>

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pipit Ila Kartika Sari

NIM : 100910201070

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Potensi Penerimaan Retribusi Pasar di Pasar Tanjung Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur Tahun 2014” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan di instansi manapun dan bukan jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Agustus 2015

Yang menyatakan,

Pipit Ila Kartika Sari

NIM 100910201070

SKRIPSI

**POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI PASAR TANJUNG
KABUPATEN JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014**

***THE POTENCY OF MARKET RETRIBUTION INCOME IN THE MARKET OF
PASAR TANJUNG KABUPATEN JEMBER EAST JAVA IN PERIODE 2014***

Oleh

Pipit Ila Kartika Sari

NIM 100910201070

Pembimbing:

Pembimbing I : Drs. Anwar, M.Si

Pembimbing II : Suji, S.Sos, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Potensi Penerimaan Retribusi Pasar di Pasar Tanjung Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur Tahun 2014” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

hari, tanggal : Senin, 24 Agustus 2015

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tim Penguji,

Ketua Penguji

Sekretaris

Dra. Inti Wasiati, M.M
NIP. 195307311980022001

Drs. Anwar, M.Si
NIP. 196306061988021001

Anggota Penguji,

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP. 195808101987021002

()

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A
NIP. 195207271981031003

RINGKASAN

Potensi Penerimaan Retribusi Pasar di Pasar Tanjung Kabupaten Jember Tahun 2014; Pipit Ila Kartika Sari; 100910201070; 2015; 95halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara; Jurusan Ilmu Administrasi; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Untuk menganalisis dan menghitung potensi penerimaan Retribusi Pasar di pasar Tanjung Kabupaten Jember tahun 2014. Retribusi pasar adalah pungutan yang digunakan untuk jasa fasilitas dan prasarana pasar. Jasa tersebut diberikan oleh pemerintah daerah kepada pengguna jasa fasilitas dan prasarana pasar. Retribusi pasar termasuk ke dalam retribusi jasa umum, yaitu berupa pelayanan yang menyediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sebagaimana yang diketahui di dalam setiap tahun retribusi pasar memiliki peran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kabupaten Jember, karena hal tersebut dalam setiap tahunnya pemerintah Kabupaten Jember memiliki target yang ingin dicapai dari penerimaan retribusi pasar. Hal ini menunjukkan Retribusi Pasar mempunyai Kontribusi yang cukup penting bagi daerah karena mempunyai pemasukan yang tinggi. Retribusi pasar Kabupaten Jember tergolong retribusi yang pemasukannya tinggi dikarenakan setiap hari orang yang menggunakan fasilitas pasar dan dikenakan retribusi, sehingga hasil pungutan tersebut akan menambah pendapatan daerah. Namun perkembangan penerimaan retribusi Pasar Tanjung di tahun 2013 belum mencapai target maksimal yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.

Permasalahan ini pada dasarnya terletak pada potensi Retribusi Pasar di pasar Tanjung yang kurang dikelola secara maksimal. Dijelaskan oleh Mahmudi (2010:73) di dalam bukunya mengenai *Manajemen Keuangan Daerah* bahwa tarif pungutan adalah salah satu indikator yang mempengaruhi suatu potensi Retribusi

Pasar. Memaksimalkan dan menggali potensi yang ada adalah suatu upaya yang dapat digunakan untuk meningkatkan penerimaan hasil Retribusi Pasar. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, sampel penelitian berjumlah 181 pedagang di Pasar Tanjung Kabupaten Jember. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Disproportionate Stratified Random Sampling*. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2014 di Dinas Pasar Kabupaten Jember dan Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember. Sumber data yang digunakan menggunakan sumber data sekunder dan primer, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, wawancara, angket atau kuesioner dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil perhitungan potensi penerimaan retribusi Pasar Tanjung tahun 2014 yang di dapat melalui hasil angket yang diberikan kepada 181 pedagang sebesar Rp. 1.557 juta sedangkan hasil realisasi penerimaan retribusi pasar yang di dapat oleh Pasar Tanjung dalam data Dinas Pasar Kabupaten Jember tahun 2014 yaitu hanya sebesar Rp. 996 juta. Penetapan tarif yang tidak sesuai dengan Perda yang berlaku adalah salah satu penyebab tidak tercapainya potensi penerimaan retribusi pasar yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Karena ketentuan tarif yang terdapat di Perda Nomor 4 Tahun 2011 lebih besar dibandingkan dengan tarif yang ditentukan oleh Perda Nomor 13 Tahun 2006, pemberlakuan tarif Perda Nomor 4 Tahun 2011 seharusnya sudah diberlakukan sejak tahun 2012. Namun Pasar Tanjung masih menetapkan tarif lama yaitu tarif yang berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2006. Lemahnya pengawasan pihak pengelola Pasar Tanjung dalam pelaksanaan tugas untuk petugas pemungut retribusi yang kurang tegas dalam melakukan penarikan retribusi kepada pedagang di Pasar Tanjung.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: “Potensi Retribusi Pasar di Pasar Tanjung Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur Tahun 2014”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dan dapat berjalan dengan lancar tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Dr. Edy Wahyudi, MM selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Drs. Anwar, M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, dukungan, saran, pikiran, waktu dan kesabaran yang penuh dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak Suji, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing II dan dosen pembimbing akademik yang telah membimbing, meluangkan waktu, pikiran dan pengarahan demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.
6. Dosen-dosen dan segenap karyawan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang memberi ilmu pengetahuan dan bantuan selama penulis kuliah.

7. Pihak Dinas Pasar Kabupaten Jember dan Dinas Pasar Uni Pasar Tanjung Kabupaten Jember khususnya Bapak Mukti selaku Kepala Bidang Retribusi, Bapak Fadjar, Bapak Iskandar dan Ibu Eliyang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan bantuan demi kelancaran penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orang tuaku; Ibu Rusmi dan Bapak Pariyono juga adikku, Rif'an Choirony yang selalu memberikan kasih sayang, keceriaan, doa, perhatian dan dukungan.
9. Teman-temanku seperjuanganku; Dia Malakaraya, Khanifah, Uswatun dan semua teman-teman seperjuanganku Administrasi Negara 2010 yang saling mengingatkan dan menunggu dosen untuk bimbingan.
10. Sahabatku; Cumi, Yeni, Wardah, Ike, Okik, Dwi Risky yang selalu memberikan semangat, dukungan, waktu, perhatian, dan menemaniku saat senang dan susah.

Semoga amal baik semua pihak yang sudah membantu penulis akan mendapat balasan dari Allah SWT, penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak. Amin.

Jember, 1 Juli 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	16
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Otonomi Daerah	17
2.2 Keuangan Daerah	19
2.3 Pendapatan Daerah	20
2.4 Pendapatan Asli Daerah	22

2.5 Retribusi Daerah.....	23
2.6 Retribusi Pasar	29
2.7 Potensi Penerimaan	32
2.8 Penelitian Terdahulu	38
2.9 Kerangka Konseptual	39
BAB 3. METODE PENELITIAN	41
3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian.....	41
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian	42
3.3.1 Populasi Penelitian	42
3.3.2 Sampel Penelitian	44
3.4 Definisi Oprasional Variabel.....	46
3.5 Data dan Sumber Data.....	48
3.6 Metode Pengumpulan Data	49
3.7 Metode Analisis Data.....	50
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	52
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	52
4.2 Pelaksanaan Penelitiian.....	70
4.3 Gambaran Pasar dan Pedagang di Pasar Tanjung Menurut	
Hasil	Penelitian
.....

4.4 Hasil Perhitungan Potensi Retribusi Pasar Tanjung	87
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	102
5.1 Kesimpulan	102
5.2 Saran	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah Eks-Karesidenan Besuki Jawa Timur dari Tahun 2011-2012	
3	
1.2 Kontribusi Retribusi Pasar Tanjung Terhadap Retribusi Pasar Daerah di Kabupaten Tahun 2009-2013	
.....	
5	
1.3 Daftar Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Pasar Tahun 2013	6

1.4	Rekapitulasi Target dan Realisasi Retribusi Pasar di Pasar Tanjung Kabupaten Jember Tahun 2009-2013	
	
	
	
	7	
1.5	Klasifikasi Pasar Daerah di kabupaten Jember	8
1.6	Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Kelas Utama Kabupaten Jember Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011	
	
	
	9	
1.7	Besaran Tarif Retribusi Pasar yang Diberlakukan di Pasar Tanjung Kabupaten Jember Oleh Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung	
	
	
	12	
1.8	Perbedaan tarif retribusi Pasar Tanjung	
	
	
	13	
1.9	Jumlah toko/kios yang terisi oleh pedagang di Pasar Tanjung Kabupaten Jember	
	
	
	14	
2.1	Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Jember di Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Kab. Jember	

.....	
.....	
31	
3.1 Rincian Jumlah Pedagang di Pasar Tanjung Berdasarkan Klasifikasi Letak Tata Usaha (LTU) beserta Luasnya Tahun 2014	
.....	
.....	
43	
3.2 Jumlah Sampel Pedagang di Pasar Tanjung	45
4.1 Jumlah Pegawai Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung Kab. Jember	68
4.2 Jumlah Responden Survei Menurut Tempat Berdagang dan Jenis Barang yang Diperdagangkan	
.....	
.....	
72	
4.3 Alasan Responden Berdagang di Pasar Tanjung Kab. Jember	74
4.4 Perbedaan Tarif di Pasar Tanjung Kab. Jember.....	78
4.5 Besaran Tarif yang berlaku di Pasar Tanjung oleh Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung	
.....	
.....	
79	
4.6 Penilaian Responden Terhadap Tarif Retribusi yang Dibebankan	80
4.7 Jumlah Sampel Pedagang di Pasar Tanjung	81
4.8 Kontribusi Retribusi Pasar Tanjung Terhadap Retribusi Pasar Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 s.d 2013	
.....	

.....
82

4.9 Rekapitulasi Target dan Realisasi Retribusi Pasar di Pasar
Tanjung Kabupaten Jember Tahun 2009 s.d 2013
.....
.....
85

4.10 Besaran Tarif Pelayanan Pasar Kabupaten Jember di Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Kabupaten Jember
.....
.....
86

4.11 Daftar Jumlah dan Luas Letak Tata Usaha (LTU) di Pasar Tanjung..... 88

4.12 Perhitungan Potensi Retribusi Pasar Tanjung Tahun 2014 berdasarkan
Perda Nomor 13 Tahun 2006
.....
.....
90

4.13 Perhitungan Potensi Retribusi Pasar Tanjung Tahun 2014 berdasarkan
Perda Nomor 13 Tahun 2006
.....
.....
91

4.14 Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar di PasarTanjung Tahun 2014..... 92

4.15 Perhitungan Potensi Penerimaan Retribusi dari Hasil Responden
di Pasar Tanjung Kabupaten Jember
.....
.....
94

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Karcis Pungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Jember.....	11
2.1 Peta Potensi Daerah di dalam Buku Mahmudi (2010:49).....	34
2.2 Kerangka Konseptual Penelitian	39
4.1 Struktur Organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember Tahun 2014	56
4.2 Struktur Organisasi Unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember	69

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Surat Permohonan Ijin Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- B. Surat Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember.
- C. Surat Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.
- D. Surat Izin Penelitian dari Dinas Pasar Kabupaten Jember.
- E. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember.
- F. Data Daftar Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Pasar Umum Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2014 oleh Dinas Pasar Kabupaten Jember
- G. Kuesioner.
- H. Dokumentasi.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desentralisasi di bidang pemerintahan atau otonomi adalah menyerahkan kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintah kepada daerah, penyerahan yang berarti memberikan kesempatan kepada aparat daerah termasuk wakil-wakil rakyatnya untuk berpartisipasi di dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai kebijaksanaan pembangunan tanpa harus mendapat arahan dan diarahkan oleh Pusat.

Setiap daerah yang disebut daerah otonom diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengurus potensi daerahnya sendiri. Seperti yang telah ditetapkan oleh Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pasal 10 ayat 3 yang menjelaskan bahwa wewenang Pemerintah Daerah tersebut dikecualikan dalam bidang: (1) Politik Luar Negeri, (2) Pertahanan, (3) Keamanan, (4) Yustisi, (5) Moneter dan fiskal nasional, serta (6) Bidang agama. Menurut penjelasan UU Nomor 32 tahun 2004 kewenangan yang luas diberikan pada daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki masing-masing. Daerah Kabupaten atau Kota memiliki wewenang pula untuk membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan kepada politik dengan baik, meningkatkan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah maka menjadi tanggung jawab bagi setiap daerah untuk

memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Untuk memenuhi semua pembiayaan daerah sendiri maka setiap daerah harus dapat menghimpun dana sebesar-besarnya untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan akan berjalan baik jika didukung biaya dan sumber daya manusia yang baik pula. Semakin besar pembangunan maka semakin besar pula biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu peningkatan Sumber Pendapatan Daerah dipandang sebagai salah satu cara yang efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari retribusi daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab. Disamping itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Dengan demikian pengenaan retribusi daerah atas penyediaan jasa Pemerintah Daerah perlu disederhanakan berdasarkan penggolongan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, yaitu golongan jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Langkah-langkah ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan retribusi daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat.

Kabupaten Jember adalah salah satu daerah otonom yang berada di Propinsi Jawa Timur dan salah satu daerah otonomi yang berada di wilayah Eks- Karesidenan Besuki (Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi), yang penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu mengalami pertumbuhan positif. Berikut adalah hasil penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari wilayah eks Karesidenan Besuki.

Tabel 1.1 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah eks Karesidenan Besuki Jawa Timurdari Tahun 2012-2013

No.	Kabupaten	2012 (Rp)	2013 (Rp)
1	Lumajang	1.123.958.500	1.188.184.539
2	Jember	2.015.280.316	2.115.746.187
3	Banyuwangi	1.671.552.960	1.771.294.840
4	Bondowoso	1.062.142.881	1.005.829.864
5	Situbondo	969.435.173	1.035.107.780

Sumber:Badan Pusat Statistik Jawa Timur (www.jatim.bps.go.id) diakses tanggal 15 September 2014. Data diolah.

Tabel 1.1 yang menunjukkan PAD di wilayah eks Karesidenan Besuki Jawa Timur yang bersumber dari BPS Jawa Timur tahun 2012-2013 (www.jatim.bps.go.id), dapat dilihat bahwa Kabupaten Jember memiliki hasil penerimaan PAD lebih besar dibandingkan dengan kabupaten yang lainnya. Ditahun 2012 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember sebesar Rp. 2.015.280.316,- dan mengalami peningkatan PAD tahun 2013 sebesar Rp. 2.115.746.187,-.

Kabupaten Jember telah berupaya meningkatkan pembangunan fisik dan non fisik guna meningkatkan pelayanan partisipasi dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Tersedianya daya dukung yang memadai sangat mempengaruhi berjalan tidaknya proses pembangunan tersebut. Oleh sebab itu, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Jember harus mampu menghimpun seluruh asset pembangunan yang ada sebagai modal pembangunan. Dari berbagai macam sumber-sumber penerimaan daerah di Kabupaten Jember, terdapat sumber penerimaan yang berasal dari retribusi daerah yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan. Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah.

Retribusi Daerah sangat potensial untuk digali dan diperluas pengelolaanya, karena retribusi daerah dipungut atas balas jasa yang disediakan oleh pemerintah

daerah meliputi jasa-jasa yang berkaitan dengan pelayanan umum, usaha-usaha tertentu maupun yang menyangkut perizinan tertentu. Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang paling memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan kemampuan dan usaha dari masing-masing pemerintah daerah dalam pemungutan retribusi. Dari golongan retribusi jasa umum terdapat jenis-jenis pelayanan diantaranya adalah retribusi pasar.

Retribusi pasar adalah pungutan yang digunakan untuk jasa fasilitas dan prasarana pasar. Jasa tersebut diberikan oleh pemerintah daerah kepada pengguna jasa fasilitas dan prasarana pasar. Retribusi pasar termasuk ke dalam retribusi jasa umum, yaitu berupa pelayanan yang menyediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sebagaimana yang diketahui di dalam setiap tahun retribusi pasar memiliki peran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kabupaten Jember, karena hal tersebut dalam setiap tahunnya pemerintah Kabupaten Jember memiliki target yang ingin dicapai dari penerimaan retribusi pasar. Hal ini menunjukkan Retribusi Pasar mempunyai Kontribusi yang cukup penting bagi daerah karena mempunyai pemasukan yang cukup tinggi. Retribusi pasar Kabupaten Jember tergolong retribusi yang pemasukannya besar dikarenakan setiap hari orang yang menggunakan fasilitas pasar dikenakan retribusi, sehingga hasil pungutan tersebut akan menambah pendapatan daerah. Sebagaimana dapat dilihat retribusi pasar adalah retribusi yang cukup potensial dalam penerimaan hasil retribusi daerah, yang kontribusinya berpengaruh di penerimaan PAD Kabupaten Jember, retribusi ini diperoleh dari hasil pemungutan di seluruh unit pasar yang ada di Kabupaten Jember.

Memantapkan kebijakan perbaikan dan meningkatkan kontribusi sektor perdagangan bagi perekonomian Kabupaten Jember merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan, melalui perbaikan sarana dan prasarana perekonomian yang ada di Kabupaten Jember. Salah satu sarana perekonomian yang dimaksud adalah pasar tradisional. Kelangsungan pasar tradisional saat ini terancam ditengah

bermunculnya banyaknya pasar modern yang menawarkan tempat berbelanja yang lebih nyaman dan praktis. Hal ini dapat menyebabkan terancamnya keberadaan pasar tradisional, yang di dalamnya banyak menyerap tenaga kerja, bila pasar-pasar tradisional yang ada di Kabupaten Jember ini tidak berkembang atau bahkan mati, maka akan banyak orang yang perekonomiannya menurun dan ini juga akan berpengaruh negatif terhadap perekonomian Kabupaten Jember.

Pasar Tanjung merupakan salah satu pasar tradisional yang termasuk pasar induk di Kabupaten Jember dan berkontribusi besar terhadap Retribusi Pasar Daerah. Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan besarnya kontribusi Pasar Tanjung terhadap Retribusi Pasar Daerah di Kabupaten Jember.

Tabel 1.2 Kontribusi retribusi Pasar Tanjung terhadap Retribusi Pasar Daerah di Kabupaten Jember ditahun 2008-2013

Tahun	Retribusi Pasar Daerah (Rp)	Retribusi Pasar Tanjung (Rp)	Besar Kontribusi (%)
2008	3.599.350.400,-	895.031.100,-	24,87
2009	3.817.123.650,-	935.695.400,-	24,51
2010	4.192.868.150,-	1.034.598.450,-	24,67
2011	4.568.537.540,-	1.138.411.540,-	24,92
2012	4.618.586.960,-	1.221.969.360,-	26,46
2013	4.589.665.000,-	1.170.805.000,-	25,51
Rata-rata Kontribusi			25,10

Sumber : Dinas Pasar Kabupaten Jember Tahun 2008-2013, data diolah.

Tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa besar rata-rata kontribusi Pasar Tanjung selama periode tahun 2008 s/d 2013 persentasenya mencapai hingga 25,10% atau $\frac{1}{4}$ (seperempat) persen dari perolehan hasil Retribusi Pasar Daerah. Sehingga dapat dinyatakan bahwa Pasar Tanjung sangat berkontribusi dalam penerimaan Retribusi Pasar Daerah di Kabupaten Jember. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum menjelaskan bahwa terdapat 33 unit pasar yang ada di Kabupaten Jember dan pasar Tanjung termasuk sebagai pasar utama dan juga sebagai pasar tradisional yang berperan sebagai pasar induk yang sangat berkontribusi terhadap hasil Retribusi Pasar Daerah. Berikut ini merupakan tabel

yang dapat menunjukkan hasil retribusi pasar dari 33 unit pasar yang ada di Kabupaten Jember di dalam laporan tahunan terahir daftar tabel rekapitulasi pendapatan retribusi pasar di Dinas Pasar Kabupaten Jember tahun 2013.

Tabel 1.3 Daftar rekapitulasi pendapatan Retribusi Pasar umum tahun 2013

No.	Unit Pasar	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	Tanjung	1.170.805.000,-	1.032.607.340,-
2	Johar	44.000.000,-	44.135.000,-
3	Gebang	180.000.000,-	180.183.000,-
4	Kreongan	56.639.000,-	56.602.000,-
5	Patrang	17.488.000,-	17.503.000,-
6	Tegalboto	101.442.000,-	101.616.200,-
7	Sukorejo	18.000.000,-	18.356.000,-
8	Mangli	101.606.000,-	90.288.000,-
9	Tegalbesar	36.164.000,-	32.807.000,-
10	Bungul	35.680.000,-	35.821.000,-
11	Burung	11.066.000,-	11.236.000,-
12	Rambipuji	355.350.000,-	355.911.000,-
13	Jenggawah	126.756.000,-	126.804.600,-
14	Petung	9.402.000,-	9.417.200,-
15	Bangsalsari	139.000.000,-	140.305.000,-
16	Tanggul	270.875.000,-	271.090.700,-
17	Manggisan	81.027.000,-	81.159.000,-
18	Kencong	-	-
19	Puger	137.816.000,-	137.897.000,-
20	Umbulsari	91.084.000,-	91.118.000,-
21	Menampu	37.201.000,-	37.258.600,-
22	Gladakmerah	72.939.000,-	73.196.000,-
23	Balung	403.692.000,-	403.952.800,-
24	Ambulu	350.043.000,-	350.138.800,-
25	Kalisat	331.333.000,-	334.084.900,-
26	Sukosari	3.303.000,-	3.324.800,-
27	Sukowono	126.536.000,-	126.847.000,-
28	Mayang	80.475.000,-	80.896.500,-
29	Sempolan	40.723.000,-	33.148.500,-
30	Balung Kulon	64.270.000,-	64.303.300,-
31	Wirolegi	23.450.000,-	24.713.000,-
32	Alun-alun	16.500.000,-	16.536.000,-
33	Lain-lain	55.000.000,-	152.749.300,-
	Jumlah	4.589.665.000,-	4.536.006.540,-

Sumber: Dinas Pasar Kabupaten Jember tahun 2013, data diolah.

Tabel 1.3 di atas merupakan hasil penerimaan retribusi pasar di seluruh unit pasar-pasar yang ada Kabupaten Jember pada tahun 2013, dapat dilihat di tabel tersebut menunjukkan bahwa Pasar Tanjung adalah pasar dengan penerimaan retribusi tertinggi di Kabupaten Jember. Oleh karena itu, Pasar Tanjung memberikan pengaruh penting terhadap Retribusi Pasar Daerah dibandingkan dengan pasar-pasar lainnya. Hal ini dapat dilihat dari laporan target penerimaan retribusi di tahun 2013 yang dibuat sebesar Rp. 1.170.805.000,- dan pasar Tanjung mampu merealisasikan penerimaan retribusi hingga Rp. 1.032.607.340,-. Nampak dari 33 unit pasar yang berada di Kabupaten Jember, Pasar Tanjung menyumbang pemasukan retribusi pasar yang paling besar.

Perkembangan penerimaan retribusi Pasar Tanjung di tahun 2013 menunjukkan belum tercapainya target maksimal yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah. Berikut ini yang tabel yang menunjukkan perkembangan Retribusi Pasar Tanjung di Kabupaten Jember tahun 2009 s/d 2013.

Tabel 1.4 Rekapitulasi target dan realisasi Retribusi Pasar di Pasar Tanjung Kab. Jember tahun 2009 s.d 2013

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2009	983.893.000,-	935.695.400,-	95,10
2010	1.033.100.000,-	1.034.598.450,-	100,14
2011	1.136.410.000,-	1.138.411.540,-	100,18
2012	1.221.641.000,-	1.221.969.360,-	100,03
2013	1.170.805.000,-	1.032.607.340,-	88,19

Sumber : Dinas Pasar Kabupaten Jember tahun 2009 s.d 2013, data diolah.

Tabel 1.4 di atas menunjukkan target dan realisasi Retribusi Pasar di Pasar Tanjung Kabupaten Jember, dapat dilihat di tabel tahun 2009 menunjukkan bahwa target yang diberikan oleh daerah sebesar Rp. 983.893.000,- hanya dapat terealisasi sebesar Rp. 934.695.400,- atau persentasenya sebesar 95,01%. Dan selanjutnya di tahun-tahun berikutnya mengalami pertumbuhan yang meningkat serta dapat melebihi target. Namun di tahun 2013 target persentasenya cenderung lebih kecil dari

tahun-tahun sebelumnya. Hasil realisasi retribusi pasar di Pasar Tanjung tahun 2013 kembali tidak memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 1.170.805.000,- dan hanya dapat terealisasi sebesar Rp. 1.032.607.340,- dengan persentase hanya sebesar 88,19%. Dengan demikian dari tabel diatas menunjukkan bahwa penerimaan retribusi pasar khususnya di pasar Tanjung Kabupaten Jember belum menampakkan hasil maksimal dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember

Peningkatan penerimaan Retribusi Pasar terutama di Pasar Tanjung Kabupaten Jember perlu dilakukan, untuk mencapai target penerimaan retribusi pasar yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan pasar yang dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Jember, dalam lampirannya terdapat pengklasifikasian golongan pasar daerah di Kabupaten Jember berdasarkan kelas-kelasnya. Berikut klasifikasi pasar daerah di Kabupaten Jember, adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5 Klasifikasi Pasar Daerah Kabupaten Jember

Klasifikasi Pasar	Nama Pasar
1. Kelas Utama	1. Pasar Tanjung
2. Kelas I (Satu)	1. Pasar Tanggul
	2. Pasar Bangsalsari
	3. Pasar Rambipuji
	4. Pasar Ambulu
	5. Pasar Balung
	6. Pasar Kalisat
	7. Pasar Kencong
	8. Pasar Mayang
	9. Pasar Sukowono
	10. Pasar Gebang
3. Kelas II (Dua)	1. Pasar Manggisari
	2. Pasar Jenggawah
	3. Pasar Umbulsari
	4. Pasar Menampu
	5. Pasar Gladak Merah
	6. Pasar Puger
	7. Pasar Mangli
	8. Pasar Kreongan

	9. Pasar Burung
	10. Pasar Bungur
	11. Pasar Patrang
	12. Pasar Tegal Besar
	13. Pasar Tegal Boto
	14. Pasar Sukorejo
	15. Pasar Balung Kulon
	16. Pasar Johar
	17. Pasar Sempolan
	18. Pasar Wirolegi
4. Kelas III (Tiga)	1. Pasar Petung
	2. Pasar Sukosari

Sumber: Dinas Pasar Kabupaten Jember, 2013, data diolah.

Di tabel 1.5 dapat dilihat bahwa Pasar Tanjung termasuk golongan pasar kelas utama atau pasar induk di Kabupaten Jember. Kemudian pemerintah memperbarui dan melengkapi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 ini dengan membuat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang di dalamnya menjelaskan mengenai penetapan sistem tarif retribusi pasar yang ditetapkan untuk seluruh pasar yang ada di Kabupaten Jember sesuai menurut klasifikasi kelas pasar. Dan Perda Nomor 4 Tahun 2011 sudah diberlakukan mulai tahun 2012. Struktur dan besarnya tarif untuk pasar umum, ditetapkan sebagaimana yang tercantum di lampiran VIII Perda Nomor 4 Tahun 2011 mengenai peraturan perhitungan besarnya retribusi harian yang dapat dilakukan dengan mengalikan tarif masing-masing LTU (Letak Tempat Usaha) dengan luas tempat yang digunakan untuk para berdagang. Berikut ini adalah daftar tarif yang dikenakan untuk pasar kelas utama di Kabupaten Jember yaitu Pasar Tanjung.

Tabel 1.6 Besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar di pasar kelas utama Kabupaten Jember menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011

Objek Retribusi/ LTU	Tarif (Rp/m ² /hari)
Pasar Kelas Utama	
LTU I (Toko/Kios yang menghadap ke luar)	400
LTU II (Toko/Kios yang menghadap ke dalam)	350
LTU III (Toko/Kios, bedak los tertutup)	250
LTU IV (los terbuka di dalam pasar)	200
LTU V (halaman pasar di dalam area pasar)	2500

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011, Lampiran VII, data diolah.

Tabel 1.5 di atas menunjukkan klasifikasi tarif yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam pemungutan retribusi pasar untuk para pedagang yang berjualan di pasar kelas utama yaitu Pasar Tanjung. Tabel 1.5 menjelaskan bahwa tarif yang dikenakan di LTU I dan LTU II merupakan tarif yang diperuntukkan untuk toko/kios yang berada di luar/dalam Pasar Tanjung. LTU III diperuntukkan untuk los yang tertutup, LTU IV diperuntukkan untuk los terbuka, LTU V ditetapkan untuk para pedagang lesehan/ pedagang kaki lima (PKL). Ketentuan penetapan tarif yang dibebankan kepada pedagang ini di perhitungkan untuk dapat memenuhi target penerimaan retribusi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Tabel 1.5 di atas juga menunjukkan bahwa LTU V penetapan tarif retribusi yang dikenakan lebih besar dibandingkan dengan LTU yang lainnya, menurut hasil wawancara dengan Bapak Mukti selaku Kepala Bidang Retribusi di Dinas Pasar Kabupaten Jember menjelaskan bahwa penetapan tarif pada LTU V lebih besar dibandingkan dengan LTU yang lainnya dikarenakan LTU V merupakan pedagang lesehan atau pedagang kaki lima yang tidak setiap harinya berdagang di area pasar. Mereka hanya berjualan dihari-hari tertentu saja atau berjualan tidak tetap, sedangkan pedagang yang memiliki toko/kios ataupun los adalah pedagang yang setiap harinya berjualan di area pasar. Oleh sebab itu dibuat suatu kebijakan untuk pedagang di LTU V dibuat lebih besar dibandingkan pedagang di LTU-LTU yang lainnya. (tanggal 16 Oktober 2014, pkl 09.45)

Penetapan tarif yang digunakan untuk pemungutan retribusi kepada pedagang di Pasar Tanjung dalam prakteknya terdapat kejanggalan, yaitu salah satunya dalam proses pemungutan retribusinya. Proses penarikan retribusi kepada para pedagang masih belum menerapkan tarif yang sesuai dengan ketentuan PERDA yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011. Pernyataan ini diperkuat dengan keterangan bapak Iskandar selaku perwakilan informasi pihak Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung, beliau menyatakan bahwa penetapan tarif retribusi yang digunakan masih menggunakan tarif lama, tarif retribusi yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor

13 Tahun 2006. (tanggal 5 November 2015, pk1 10.30). Berikut ini merupakan contoh bukti karcis yang dikenakan untuk para pedagang yang ada di Pasar Tanjung.



Gambar 1.1 Karcis Pungutan Retribusi Pasar Tanjung Kabupaten Jember yang langsung didapat dari pedagang

Gambar 1.1 diatas merupakan contoh 2 lembar karcis yang diberikan kepada para pedagang pasar, yang digunakan untuk menarik retribusi di Pasar Tanjung Kabupaten Jember. Peneliti mendapatkan contoh karcis ini langsung dari pedagang di Pasar Tanjung. Contoh lembar karcis diatas menjelaskan pembayaran dengan tarif Rp. 1000,- dan Rp. 500,-. Karcis ini diberikan kepada pedagang untuk bukti telah melakukan pembayaran retribusi. Setelah peneliti terjun langsung ke Pasar Tanjung, peneliti menemukan ketidaksesuaian pemberlakuan tarif yang dikenakan untuk para pedagang, seperti misalnya yang dikenakan untuk pedagang golongan LTU V yaitu pedagang lesehan yang dikenakan tarif Rp. 1500,-/m²/hari oleh petugas pemungut retribusi pasar, seharusnya LTU V dikenakan tarif retribusi sebesar Rp. 2500,-/m²/hari. Ketidaksesuaian pemberlakuan tarif ini ternyata juga terjadi digolongan LTU-LTU lainnya.

Pihak Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung menyatakan bahwa masih menggunakan tarif yang lama tarif dari Perda Nomor 13 Tahun 2006, padahal dari Dinas Pasar Kabupaten Jember berkata lain Dinas Pasar menyatakan sudah memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 ke seluruh pasar di Kabupaten Jember sejak tahun 2012 terutama Pasar Tanjung yang merupakan pasar kelas utama di Kabupaten Jember. Berikut ini merupakan tarif lama yaitu tarif

retribusi pasar menurut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 yang seharusnya tidak diberlakukan lagi.

Tabel 1.7 Besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Tanjung Kabupaten Jember menurut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006

Objek Retribusi/ LTU	Tarif (Rp/m ² /hari)
Pasar Kelas Utama	
LTU I (Toko/Kios yang menghadap ke luar)	250
LTU II (Toko/Kios yang menghadap ke dalam)	200
LTU III (Toko/Kios, bedak los tertutup)	175
LTU IV (los terbuka di dalam pasar)	150
LTU V (halaman pasar di dalam area pasar)	150

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006, Lampiran, data diolah.

Tabel 1.7 diatas menunjukkan tarif lama retribusi pasar yang tercantum di Perda Nomor 13 Tahun 2006, yang juga masih digunakan sebagai pacuan tarif penarikan retribusi pasar oleh pihak pengelolaan Pasar Tanjung. Hal ini menunjukkan bahwa adanya potensi yang seharusnya bisa tergali namun belum dapat tergali secara maksimal, dikarenakan Pasar Tanjung yang masih menggunakan tarif lama dari Perda Nomor 13 Tahun 2006, yang nampak dari perbedaan tarif yang cukup jauh dari kedua Perda tersebut, yakni Perda Nomor 4 Tahun 2011 dengan Perda Nomor 13 Tahun 2006. Apabila Pasar Tanjung menggunakan tarif menurut ketentuan Perda Nomor 4 Tahun 2011 maka penerimaan retribusi pasar di Pasar Tanjung akan cenderung lebih tinggi dan dapat mencapai target yang ditetapkan. Berikut merupakan perbedaan tarif dari Perda Nomor 13 Tahun 2006 dengan Perda Nomor 4 Tahun 2011:

Tabel 1.8 Perbedaan Tarif Retribusi Pasar Tanjung

Letak Tata Usaha	Tarif Retribusi Pasar Berdasarkan PERDA no. 13 Tahun 2006	Tarif Retribusi Pasar Berdasarkan PERDA no. 4 Tahun 2011
LTU I	Rp. 250,-	Rp. 400,-
LTU II	Rp. 200,-	Rp. 350,-
LTU III	Rp. 175,-	Rp. 250,-
LTU IV	Rp. 150,-	Rp. 200,-
LTU V	Rp. 1500,-	Rp. 2500,-

Sumber:

- PERDA no.13 tahun 2006 tentang pengelolaan pasar yang dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Jember
- PERDA no.4 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum

Tabel 1.8 diatas menunjukkan perbedaan tarif yang ada di Perda Nomor 13 Tahun 2006 dengan Perda Nomor 4 Tahun 2011. Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat kenaikan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dari Perda lama ke Perda yang baru. Dalam hal ini Pasar Tanjung masih menggunakan tarif yang lama, tarif yang terdapat di Perda Nomor 13 Tahun 2006. Pihak Dinas Pasar Kabupaten Jember menyatakan adanya target yang diberikan untuk penerimaan retribusi pasar terutama di Pasar Tanjung setiap tahunnya meningkat, peningkatan target ini diharapkan untuk meningkatkan upaya pihak pengelola pasar agar dapat menggali potensi yang belum tergali secara maksimal. (tanggal 25 Oktober 2014, pk1 10.00)

Pihak pengelola Pasar Tanjung yakni Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung menyatakan bahwa Jumlah Kios dan Los di Pasar Tanjung Kabupaten Jember pada tahun 2014 memiliki jumlah total toko/kios sebesar 1251 toko. Jumlah tersebut merupakan jumlah dari Jumlah Toko/kios/los/lesehan yang ada di lantai atas dan lantai bawah. Namun dari banyaknya toko/kios yang dimiliki tidak semuanya terisi dan ditempati untuk berdagang.

Tabel 1.9 Jumlah toko/kios yang terisi oleh pedagang di Pasar Tanjung Kabupaten Jember tahun 2014

Toko/kios yang terdapat di Pasar Tanjung	Jumlah toko/kios
Lantai Bawah	531
Lantai Atas	720
Toko/kios yang terisi di Pasar Tanjung	Jumlah toko/kios
Lantai Bawah	524
Lantai Atas	334

Sumber : Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember, data diolah.

Tabel 1.9 merupakan tabel yang menjelaskan tentang jumlah toko/kios yang berada di Pasar Tanjung Kabupaten Jember tahun 2014, nampak terlihat bahwa di lantai bawah terisi 524 toko/kios dan terdapat 7 toko yang masih kosong atau belum terisi. Kemudian di lantai atas juga menunjukkan banyak sekali toko/kios yang belum diisi oleh pedagang, dapat dilihat di tabel di lantai atas hanya terisi 386 toko/kios. Hal tersebut tentunya akan mempengaruhi pemasukan penerimaan retribusi Pasar Tanjung, sehingga pendapatan retribusi yang diperoleh tidak optimal bahkan hal ini juga menjadi penyebab tidak tembusnya target retribusi yang telah ditetapkan.

Permasalahan ini pada dasarnya terletak pada pengelolaan potensi retribusi pasar di pasar Tanjung yang kurang dikelola secara maksimal dan optimal. Dijelaskan oleh Mahmudi (2010:73) di dalam bukunya mengenai *Manajemen Keuangan Daerah* bahwa indikator yang mempengaruhi suatu potensi retribusi terutama retribusi pasar adalah salah satunya tarif retribusi dan jumlah pemanfaatan toko, kios dan los. Oleh karena itu memaksimalkan dan menggali potensi yang ada adalah suatu upaya yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil penerimaan Retribusi Pasar.

Sehubungan dengan hal tersebut maka latar belakang dari penelitian ini adalah:

“ Potensi Penerimaan Retribusi Pasar di Pasar Tanjung Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 “.

1.2. Rumusan Masalah

Adanya otonomi daerah dengan menganut asas desentralisasi yang pada hakekatnya merupakan pemberian kewenangan daerah untuk merumuskan dan mengembangkan potensi daerahnya dalam rangka untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat serta kondisi dan kemampuan daerah dalam usaha untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor retribusi daerah, maka dapat dilihat dari ketentuan yang telah dikeluarkan baik dari pihak Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah itu sendiri

Demikian halnya dengan Kabupaten Jember dalam pelaksanaan otonomi daerah berusaha memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan memanfaatkan berbagai komoditas dan potensi yang dimiliki, demi terselenggaranya otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Dalam hal ini retribusi pasar merupakan suatu penyumbang Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jember yang perlu di perhatikan pengelolaannya dalam rangka untuk mencapai efektivitas penerimaan retribusi dari pasar itu sendiri.

Berdasarkan dari uraian yang ada di latar belakang masalah dimana penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Jember belum mencapai target secara maksimal yang ditentukan di beberapa tahun anggaran terakhir, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

Bagaimana potensi retribusi pasar di Pasar Tanjung Kabupaten Jember tahun 2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk menganalisis dan menghitung potensi penerimaan Retribusi Pasar di pasar Tanjung Kabupaten Jember tahun 2014.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa saran kepada Dinas Pasar agar dapat lebih meningkatkan penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Jember.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi bagi semua pihak yang tertarik dan berkepentingan dengan masalah ini. Terutama untuk dapat mengetahui perkembangan peranan retribusi pasar di Kabupaten Jember dalam melaksanakan Otonomi Daerah.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 5 yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undang. Selanjutnya Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 menyebutkan daerah otonom adalah Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Widjaja (1998:3) juga berpendapat bahwa pengertian otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah tidak akan mengarah kepada disintegrasi Negara, sebaliknya otonomi daerah akan lebih mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menciptakan pemerataan pembangunan yang sekalipun akan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Selanjutnya Widjaja (1998:133) juga menyatakan bahwa pelaksanaan otonomi daerah saat ini adalah otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab yang akan memberikan kepercayaan bagi daerah Kabupaten/Kota untuk mengelola kewenangan yang lebih besar dan luas. Di samping itu, pemberian otonomi yang luas juga akan menjamin kemantapan otonomi daerah, karena kedudukan daerah kabupaten dan daerah kota yang merupakan daerah otonom tidak lagi dalam hubungan vertikal dengan pemerintah daerah provinsi tetapi masing-masing daerah tersebut berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain. Pengertian asas otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab yaitu :

a. Otonomi yang Luas

Adalah keleluasan daerah dalam semua bidang pemerintah kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan,

moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Di samping itu keleluasan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi

b. Otonomi yang Nyata

Adalah keleluasan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Daerah demikian isi dan jenis otonomi bagi seteiap daerah lainnya.

c. Otonomi yang Bertanggung jawab

Adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud dalam wujud tugas dan kewajiban yang dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan dalam pemberian otonomi berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokratis, keadilan, dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dengan daerah serta antar-daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Indonesia.

Dengan adanya otonomi, pembangunan di daerah akan lebih cepat dan ekonomis karena dilakukan oleh sumber daya manusia itu sendiri yang lebih tahu apa yang dibutuhkan daerah tersebut (Gunawan, 1999:23) juga menyatakan bahwa,

“Hakikat otonomi adalah meletakkan landasan pembangunan yang tumbuh berkembang dari rakyat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh rakyat dan hasilnya dinikmati oleh seluruh rakyat”.

2.2 Keuangan Daerah

Dalam bukunya Sistem Administrasi Keuangan Daerah, Mamesah (1995:16) menyatakan pengertian keuangan daerah sebagai berikut,

“Keuangan daerah secara sederhana dapat dirumuskan sebagai: Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau Daerah yang lebih tinggi serta

Widjaja (2002:143) juga mendefinisikan pengertian keuangan daerah, merupakan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam APBD.

Selama ini pembiayaan pembangunan di daerah lebih didasarkan kepada seberapa besar subsidi/ bantuan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal ini tercermin dari proporsi sumbangan dan bantuan total penerimaan daerah. Lebih lengkap penjelasan mengenai kondisi keuangan daerah dikemukakan oleh (Alfians, 1985:103) :

- a. Masih sangat minimnya sumbangan pendapatan daerah terhadap anggaran belanja daerah yang dimanfaatkan guna kepentingan umum daerah.
- b. Seberapa besar pendapatan daerah berasal dari sumbangan atau subsidi serta bantuan dari pemerintah pusat.
- c. Kontribusi pajak daerah dan PAD lainnya terhadap penerimaan total sangat kecil karena hampir semua pajak di daerah dijadikan pajak sentral dan dipungut oleh pemerintah daerah.
- d. Kontrol yang luas dari pemerintah pusat terhadap keuangan daerah.

2.3 Pendapatan Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah faktor keuangan sangat mempengaruhi untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Agar fungsi pemerintahan daerah dapat terlaksana secara optimal untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan baik, maka harus diimbangi dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu, pemerintah daerah juga harus mampu menggali sumber-sumber penerimaan dari daerahnya sendiri. Jadi sumber keuangan daerah bisa berupa pemberian pemerintah pusat maupun dari pendapat asli daerah. (Mahmudi, 2010:16)

2.3.1 Pengertian Pendapatan Daerah

Pengertian pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah adalah bahwa hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sedangkan pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang tersebut bahwa pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Widjaja (2003:42) juga mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi).

Dari definisi atau pengertian mengenai pendapatan daerah seperti yang telah dikemukakan diatas, maka pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang berasal dari potensi sumber-sumber keuangan milik daerah yang digali dan dihimpun untuk membiayai kegiatan baik rutin maupun pembangunan yang menjadi tugas tanggung jawabnya. Jadi pengertian Pendapatan Asli Daerah di sini merupakan sumber penerimaan daerah di luar sumbangan atau bantuan dari pemerintah pusat, bagi hasil pajak dan bukan pajak dan penerimaan lain-lain.

2.3.2 Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibiayai dari dana atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sehingga daerah memerlukan kewenangan dan kemampuan untuk menggali keuangannya sendiri, yang didukung oleh perkembangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antara Propinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan prasyarat dalam sistem Pemerintahan Daerah.

Sumber-sumber penerimaan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Pasal 5 terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan Pendapatan Daerah bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan.

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah dana yang bersumber dari :

- 1.1) Dana darurat dari Pemerintah Pusat dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam
- 1.2) Hibah, dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi/Kota/Kabupaten di luar wilayah propinsi, dari perusahaan daerah (BUMD), dan perusahaan Negara (BUMN), atau dari masyarakat.
- 1.3) Bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi/Kota/Kabupaten di wilayah propinsi, bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi/Kota/Kabupaten lainnya di luar wilayah propinsi.

Sedangkan pembiayaan bersumber dari :

- a) Sisa lebih perhitungan anggaran Daerah
- b) Penerimaan Pinjaman Daerah
- c) Dana Cadangan Daerah, dan
- d) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

2.4 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 157 yang mengatur tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Pasal 6 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dijelaskan ketentuan mengenai Pendapatan Asli Daerah, diantaranya menyebutkan beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah.

Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari :

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD).
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara (BUMN).
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah

Sedangkan lain-lain PAD yang sah adalah sebagai berikut :

- 1) Hasil penjualan Daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Jasa Giro
- 3) Pendapatan Bunga
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.5 Retribusi Daerah

Dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya daerah tentu membutuhkan dana. Dana ini diperoleh daerah dari Pemerintahan Pusat dan dari pendapatan daerah sendiri. Salah satu sumber pendapatan daerah berasal dari daerah adalah retribusi daerah. Retribusi Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2.5.1 Pengertian Retribusi Daerah

Mahmudi (2010:25) mendefinikan retribusi pengertian retribusi sebagai berikut,

“Retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditujukan, paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah ia tidak akan dikarenakan iuran tersebut”.

Retribusi Daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan definisi retribusi daerah bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dari pengertian retribusi daerah tersebut maka menurut Kaho (2005:171) dapat dilihat ciri-ciri mendasar dari Retribusi Daerah adalah :

- a. Retribusi dipungut oleh Daerah.
- b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah secara langsung.
- c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau memakai jasa yang disediakan daerah.

Dari pengertian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah dipungut karena adanya suatu balas jasa yang dapat disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi tidak akan dipungutan tanpa adanya balas jasa yang langsung dapat ditunjuk. Retribusi seperti halnya pajak tidak langsung yang dapat dihindari oleh masyarakat, artinya masyarakat dapat tidak membayar retribusi dengan menolak atau tidak mengambil manfaat terhadap jasa yang disediakan pemerintah.

2.5.2 Ciri Retribusi Daerah

Menurut Soedargo (2009:18) retribusi daerah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang menggunakan dan memanfaatkan jasa ataupun barang yang disediakan oleh pemerintah.
- b. Adanya balas jasa secara langsung yang dikenakan oleh pengguna jasa atas barang pemerintah.
- c. Berlakunya asas pengecualian bagi yang tidak memanfaatkan jasa atau barang pemerintah maka tidak dikenakan pungutan.
- d. Retribusi daerah dipungut berdasarkan undang-undang atau peraturan daerah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat.

- e. Bagi pengguna jasa atau barang jika diketahui tidak membayar dapat dikenai hukuman atau sanksi yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan daerah.

2.5.3 Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Daerah

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, sehingga semua penyelenggaraan kehidupan masyarakat Indonesia harus didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku peraturan hukum yang berlaku, tidak terkecuali dalam hal pemungutan retribusi daerah pun juga harus berdasarkan hukum.

Beberapa dasar hukum yang digunakan sebagai dasar pemungutan retribusi adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat (2).
- b. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- c. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- d. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.5.4 Asas-asas Pemungutan Retribusi Daerah

Pemerintah Daerah dalam pemungutan retribusi daerah menurut Soedargo (2009:123) didasarkan pada asas-asas pemungutan retribusi daerah sebagai berikut :

- a. Mengadakan, merubah, meniadakan retribusi daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- b. Pembayaran pungutan retribusi daerah tidak dimaksudkan sebagai pembayaran atas penyelenggaraan usaha perusahaan.
- c. Tarif suatu retribusi daerah tidak boleh ditetapkan setinggi-tingginya tetapi keuntungan yang diharapkan hanya sekedar untuk memelihara agar dapat memberikan jasa secara langsung kepada masyarakat.
- d. Jumlah tarif suatu retribusi daerah harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah atau setidaknya tidaknya dapat dihitung menurut ketentuan yang berlaku.
- e. Retribusi Daerah tidak boleh merupakan rintangan bagi keluar masuknya atau pengangkutan barang-barang ke dalam dan keluar daerah.
- f. Pemungutan Retribusi Daerah tidak boleh digadaikan kepada pihak ketiga.

- g. Peraturan Retribusi Daerah tidak boleh diadakan perbedaan dan pemberian keistimewaan yang menguntungkan perseorangan, golongan atau keagamaan.

2.5.5 Jenis-jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 108 ayat (1) dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

- a. Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari :

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/kesehatan
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadaman Kebakaran
- 9) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

- b. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan
- 4) Retribusi Terminal
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- 6) Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa
- 7) Retribusi Penyedotan Kakus
- 8) Retribusi Rumah Potong Hewan
- 9) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
- 10) Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga
- 11) Retribusi Penyebrangan di Atas Air

- 12) Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
- 13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- c. Retribusi Perijinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintahan Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis Retribusi Perijinan Tertentu yaitu :

- 1.1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- 1.2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- 1.3) Retribusi Izin Gangguan
- 1.4) Retribusi Izin Trayek

2.5.6 Subyek dan Obyek Retribusi Daerah

2.5.6.1 Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 subyek Retribusi Daerah terbagi atas :

- a) Subyek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan
- b) Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan
- c) Subyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

2.5.6.2 Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 juga disebutkan, obyek Retribusi Daerah terbagi atas :

- a) Obyek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pelayanan yang termasuk jasa umum antara lain pelayanan kesehatan, pelayanan sampah, pelayanan parkir di tepi jalan umum dan pelayanan pasar.
- b) Obyek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sector swasta. Jasa ini antara lain retribusi terminal, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan pertokoan, dan retribusi tempat parkir

c) Obyek Retribusi Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Perizinan tertentu antara lain retribusi izin mendirikan bangunan. Izin tempat penjualan minuman beralkohol, izin gangguan, dan izin trayek.

2.5.7 Prinsip atau Kriteria Penentuan Tarif Retribusi Daerah

Menurut Purwanto (2006:147) prinsip dan sasaran dalam penentuan tarif retribusi ditentukan sebagai berikut :

- a. Retribusi Jasa Umum, berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan besarnya biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- b. Retribusi Jasa Usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak yang dapat diperoleh pemerintah daerah atas usaha yang dijalankan oleh pihak swasta.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, berdasarkan pula pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan

2.6 Retribusi Pasar

2.6.1 Pengertian Retribusi Pasar

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, di dalam bab VII dijelaskan Retribusi Pelayanan Pasar. Pasar adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan perdagangan di waktu siang maupun malam yang terdiri dari bangunan pasar, halaman, dan fasilitas lain seperti los/ kios bedak, halaman terbuka, rumah toko, dan bangunan lainnya yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Jember.

Los adalah bangunan tetap maupun tidak tetap didalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding, sedangkan kios adalah bangunan pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan usaha pekerjaan. Dan disebutkan juga bahwa Retribusi Pasar itu sendiri adalah

pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/pelataran, los, kios, bedak, toko/ruko dan atau sejenis yang dikelola Pemerintah Daerah dan khususnya disediakan untuk pedagang barang dan jasa. Retribusi Pasar merupakan salah satu Retribusi Daerah yang termasuk dalam jenis Retribusi Jasa Usaha.

Oleh karena itu dalam retribusi pasar prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi pasar didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengelolaan, biaya penyelenggaraan, biaya kebersihan dan biaya administrasi.

2.6.2 Obyek Retribusi Pasar

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 juga menjelaskan tentang obyek Retribusi Pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa kios/bedak/pelataran/los yang dikelola Pemerintah Daerah dan khususnya disediakan untuk pedagang. Tidak termasuk obyek retribusi pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta maupun Perusahaan Daerah.

2.6.3 Subyek Retribusi Pasar

Menurut Perda Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 juga menjelaskan subyek Retribusi Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan/menikmati jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten. Yang dimaksud dengan badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koprasi, Yayasan, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usaha lainnya.

2.6.4 Tarif Retribusi Pasar

Tarif retribusi pasar di Kabupaten Jember didasarkan pada klasifikasi pasar yang terdiri atas pasar kelas utama, kelas I, kelas II, dan kelas III serta tarif retribusi juga didasarkan pada Letak Tempat Usaha (LTU), LTU yang terdapat di pasar daerah Kabupaten Jember yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Jember di Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Kabupaten Jember

Objek Retribusi/ LTU	Tarif (Rp/m ² /hari)
Pasar Kelas Utama	
LTU I	400
LTU II	350
LTU III	250
LTU IV	200
LTU V	2500
Pasar Kelas I	
LTU I	300
LTU II	250
LTU III	200
LTU IV	150
LTU V	1500
Pasar Kelas II	
LTU I	250
LTU II	200
LTU III	150
LTU IV	100
LTU V	1250
Pasar Kelas III	
LTU I	200
LTU II	150
LTU III	100
LTU IV	100
LTU V	1000

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011, Lampiran VII, data diolah.

Keterangan:

1. LTU 1 yakni toko atau kios yang menghadap keluar
2. LTU 2 yakni toko atau kios yang menghadap kedalam
3. LTU 3 yakni toko atau kios, bedak los tertutup
4. LTU 4 yakni los terbuka di dalam pasar, dan
5. LTU 5 yakni halaman pasar di dalam atau di luar area sekitar pasar

Di lihat dari tabel 2.1 merupakan pembagian tarif pasar-pasar di Kabupaten Jember yang dikelompokkan berdasarkan kelas pasarnya. Kemudian pedagang dan pemilik toko atau kios, ruko yang berada di lingkungan pasar dengan radius 250 meter dikenakan retribusi sebesar 25% dari tarif retribusi yang berlaku. Dalam proses pembayaran tarif yang telah ditentukan tersebut, pembayaran dapat dilakukan secara berlangganan. Apabila proses pembayaran dilakukan secara berlangganan maka pembayaran dilakukan setiap awal bulan dengan menggunakan kartu langganan yang ditentukan.

2.7 Potensi Penerimaan Retribusi Pasar

2.7.1 Pengertian Potensi Pendapatan

Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh di tangan. Potensi bersifat tersembunyi, sehingga perlu diteliti besarnya kemampuan yang ada, termasuk potensi pendapatan. Dan

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan merupakan bagian dari salah satu upaya mengenali potensi (Mahmudi, 2010:48).

Menurut Sunarto (2009:24) mendefinisikan potensi sebagai berikut :

“Daya.Kekuatan atau kesanggupan untuk menghasilkan penerimaan daerah atau kemampuan yang pantas diterima dalam keadaan seratus persen.”

Mahmudi (2010:48) juga menyatakan bahwa, potensi pendapatan suatu daerah berbeda-beda disebabkan oleh faktor demografi, ekonomi, sosiologi, budaya, geomorfologi, dan lingkungan yang berbeda-beda. Namun terkadang suatu potensi tidak dapat diolah akibat keterbatasan sumber daya manusia, permodalan, dan peraturan perundang-undangan yang membatasi. Jika dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi yang ada, suatu daerah dapat dikategorikan menjadi 4 (empat), yaitu :

1.a. Memiliki potensi dan kemampuan mengelola yang tinggi.

Dalam kondisi ini merupakan kondisi yang ideal, yaitu memiliki potensi pendapatan yang tinggi serta kemampuan pengelolaan potensi yang tinggi pula. Kemampuan pengelolaan yang tinggi bukan berarti potensi harus dieksploitasi seluruhnya sampai habis karena tidak dapat diperbarui.

1.b. Memiliki potensi yang tinggi kemampuan mengelola rendah.

Dalam kondisi ini potensi yang dimiliki tinggi namun tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola potensi secara memadai. Dimana hal ini dapat menjadi ajang kepentingan banyak pihak yang bisa merebut atau mengeksploitasi potensi besar yang tidak dikelola dengan baik.

1.c. Memiliki potensi yang rendah tetapi memiliki kemampuan mengelola yang tinggi.

Dalam kondisi ini potensi yang dimiliki rendah tetapi pada dasarnya mempunyai kapasitas untuk mengelola potensi yang tinggi.

1.d. Memiliki potensi yang rendah dan kemampuan mengelola rendah.

Dalam kondisi ini adalah kondisi yang paling buruk, dimana potensi yang dimiliki rendah dan kemampuan pengelolaan potensi pun juga rendah. Sehingga ini termasuk kondisi yang sulit untuk berkembang.

POTENSI

Tinggi	KUADRAN II Potensi Tinggi, Kemampuan Mengelola Rendah (Intensifikasi)	KUADRAN I Potensi Tinggi Kemampuan Mengelola Tinggi (Promosi & Ekspansi)
Rendah	KUADRAN IV Potensi Rendah, Kemampuan Mengelola Rendah (Edukasi & Pengembangan)	KUADRAN III Potensi Rendah Kemampuan Mengelola Tinggi (Ekstensifikasi/Ekspansi)

Rendah Tinggi
KEMAMPUAN MENGELOLA

Gambar 2.1 Peta potensi daerah (Mahmudi, 2010:49)

Gambar 2.1 diatas menunjukkan peta potensi daerah yang dikemukakan oleh Mahmudi yang diibaratkan menggunakan kuadran, yang dapat dijelaskan bahwa Kuadran I merupakan kondisi yang ideal, yaitu pemerintah memiliki potensi pendapatan yang tinggi serta kemampuan mengelola potensi tersebut juga tinggi. Dalam kondisi ini perlunya promosi dan ekspansi untuk strategi pengembangan potensi yang ada. Kemudian Kuadran II adalah kondisi pemerintah yang memiliki potensi pendapatan yang tinggi tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola potensi tersebut secara memadai. Dalam kondisi ini perlunya Intensifikasi pendapatan agar pengelolaan potensi menjadi lebih baik. Selanjutnya Kuadran III adalah suatu kondisi pemerintah yang memiliki potensi yang rendah tetapi pada dasarnya mempunyai kapasitas untuk mengelolanya tinggi. Dimana dalam kondisi ini perlu adanya ekstensifikasi atau ekspansi dengan memanfaatkan potensi yang lain guna meningkatkan pendapatan. Dan yang terakhir Kuadran IV merupakan kondisi yang paling buruk yang perlu dihindari, yaitu potensi yang dimiliki rendah dan kemampuan mengelola pendapatan pun juga rendah. Dalam kondisi ini perlu adanya edukasi dan pengembangan yang merupakan strategi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui program pendidikan dan pelatihan (edukasi). Sehingga dapat memiliki kapasitas pengelolaan potensi pendapatan secara lebih baik.

2.7.2 Menghitung Potensi Pendapatan

Menurut Mahmudi (2010:52) bahwa faktor eksternal seperti perkembangan perekonomian regional dan global juga dapat mempengaruhi pertumbuhan potensi ekonomi nasional dan daerah. Sumber-sumber utama pendapatan suatu daerah secara umum dapat dilihat pada data Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dapat dirinci ke masing-masing sektor. PDRB sektoral untuk menentukan nilai PDRB suatu daerah yaitu :

- a. Sektor Pertanian
- b. Sektor Pertambangan dan Panggalian
- c. Sektor Industri
- d. Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih
- e. Sektor Kontruksi (Bangunan)
- f. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran
- g. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi
- h. Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan
- i. Jasa-jasa

Analisis Tipologi Klassen merupakan teknik pengelompokan suatu sektor dengan melihat pertumbuhan dan kontribusi sektor tertentu terhadap total PDRB suatu daerah. Sehingga dapat dipetakan potensi daerah secara sektoral ke dalam 4 (empat) kategori :

5.a. Sektor Unggulan (Prima)

Sektor prima adalah sektor yang paling dominan kontribusinya terhadap perekonomian daerah. Karena sektor tersebut pertumbuhannya tinggi dan kontribusinya terhadap PDRB besar.

5.b. Sektor Potensial

Sektor potensial adalah sektor yang juga memberikan kontribusi tinggi bagi perekonomian daerah tetapi pertumbuhan sektor tersebut lambat dan cenderung menurun.

5.c. Sektor Berkembang

Sektor berkembang adalah sektor yang sedang mengalami peningkatan yang diindikasikan dengan pertumbuhan tinggi tetapi kontribusinya masih rendah.

5.d. Sektor Terbelakang

Sektor terbelakang adalah sektor yang menjadi kelemahan daerah yang diindikasikan dengan pertumbuhan lambat dan kontribusi terhadap PDRB rendah.

Analisis Tipologi Klassen juga bermanfaat untuk mengidentifikasi peta potensi ekonomi secara makro tetapi tidak menunjukkan jumlah riil potensi yang ada. Untuk mengetahui besarnya potensi riil pendapatan yang dimiliki oleh suatu daerah, diperlukan identifikasi dan perhitungan potensi dengan basis mikro (Mahmudi, 2010:53)

Mahmudi selanjutnya menyatakan penghitungan potensi pendapatan pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu : (1) basis makro dan (2) basis mikro. Perhitungan basis makro misalnya dilakukan melalui teknis estimasi dengan model regresi ekonometrik yang menggunakan variabel makro ekonomi sebagai proksi. Sedangkan penghitungan berbasis mikro dilakukan dengan cara melakukan survei dan observasi terhadap subjek dan objek pajak/retribusi dan kemudian dilakukan perhitungan potensi pendapatan yang ada.

**Potensi Pendapatan Pajak/Retribusi = Basis Pajak/Retribusi x Tarif Pajak
Retribusi**

Langkah-langkah yang dilakukan :

- a. Mengidentifikasi objek pendapatan pajak/retribusi
- b. Menentukan pajak/retribusi yang akan diteliti
- c. Melakukan observasi untuk memperoleh data
- d. Menghitung potensi pajak/retribusi

2.7.3 Menghitung Potensi Retribusi Daerah

Menghitung potensi retribusi daerah adalah dengan mengalihkan basis retribusi daerah dengan tarif retribusi yang ditetapkan. Pada dasarnya retribusi memiliki jenis yang lebih beragam dan fleksibel dibandingkan dengan pajak daerah, namun tidak semua retribusi tersebut berpotensi dalam memberikan kontribusi PAD secara signifikan. Pungutan daerah berupa retribusi memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan suatu pelayanan. Pembayaran pajak daerah tidak memperoleh imbalan secara langsung atas uang pajak yang mereka bayarkan, sedangkan pembayaran retribusi bisa memperoleh imbalan berupa jasa yang dapat dinikmati secara langsung. (Mahmudi, 2010:64).

2.7.4 Menghitung Potensi Retribusi Pasar

Retribusi pelayanan pasar adalah pungutan sebagai pembayaran atas penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan kios, los, atau toko di kawasan pasar dan tempat perdagangan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jenis pasar yang dapat dikenakan retribusi pelayanan pasar meliputi; pasar umum dan

pasar hewan (Mahmudi, 2010:73). Ada beberapa indikator untuk menghitung potensi retribusi pasar :

- a. Fasilitas pasar
- b. Jenis dagangan
- c. Jumlah petugas pemungut
- d. Tarif retribusi
- e. Jumlah kios dan los
- f. Luas pasar dan area kaki lima
- g. Data penerimaan retribusi tahunan

Rumus dasar perhitungan potensi retribusi pasar umum

Rumus untuk menghitung potensi retribusi pasar umum menurut Mahmudi (2010:73) dinyatakan sebagai berikut :

$$[(\text{Jml. Kios} \times \text{TR}) + (\text{Jml. Los} \times \text{TR}) + (\text{Jml. K5} \times \text{TR})] \times [\Sigma \text{Aktivitas pasar sebulan} \times 12]$$

Keterangan :

Jml. Kios = jumlah kios

Jml. Los = jumlah los

Jml. K5 = jumlah pedagang kaki lima

TR = tarif retribusi

2.8 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan referensi utama dalam penelitian ini pertama penelitian yang dilakukan oleh Budi Utomo (2011) yang berjudul “Analisis Proyeksi Retribusi Pasar Tanjung di Kabupaten Jember “. Pada penelitian ini diketahui bahwa salah satu retribusi yang berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Jember adalah retribusi Pasar dan variable yang mempengaruhi penerimaan pajak dan retribusi daerah adalah PDRB dan jumlah penduduk.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yuniar dan Hapsari (2013) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi pasar Tanjung tahun 2006-2011. Penelitian menjelaskan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi pasar Tanjung, yakni : Lemahnya pengawasan dari pihak lembaga, kesadaran dari pedagang dalam

pembayaran retribusi, lemahnya konsistensi lembaga terhadap peraturan dan jumlah objek retribusi pasar.

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan sebagai penelitian pendukung pada penelitian utama adalah penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Afthor (2004) dengan judul “Potensi Pajak dan Retribusi Daerah”. Pada penelitian tersebut didapatkan bahwa pada dasarnya pajak dan retribusi yang mempunyai potensi untuk dikembangkan. Adapun pajak dan retribusi daerah yang mempunyai potensi untuk dikembangkan diantaranya retribusi pasar..

Dari beberapa penelitian terdahulu ini mengenai pengelolaan retribusi pasar memiliki keterkaitan terhadap penelitian ini, namun penelitian ini menfokuskan pada potensi penerimaan retribusi pasar di pasar Tanjung Kabupaten Jember, karena besarnya retribusi terutama retribusi pasar sangat berkontribusi besar terhadap hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. Menggali penyebab belum tercapainya target penerimaan retribusi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kepada Dinas Pasar Kabupaten Jember yang diharapkan mampu meningkatkan penerimaan Retribusi Pasar. Hal ini yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya.

2.9 Kerangka Konseptual

Penelitian ini memiliki rumusan konsep pemikiran yang didalamnya terkandung pokok-pokok pemikiran. Kerangka pemikiran ini berfungsi sebagai alur pemikiran peneliti dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Kerangka pemikiran penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

Retribusi Daerah merupakan Sumber Pendapatan Daerah yang paling besar berkontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam fokus penelitian ini adalah Potensi Retribusi Pasar yang meneliti Pasar Tanjung sebagai studi kasus. Dimana pasar Tanjung merupakan pasar Induk dan Pasar kelas Utama di Kabupaten Jember. Potensi pendapatan Retribusi pasar dilihat dari buku Mahmudi (2010:73) dapat dihitung dengan rumus yaitu jumlah Kios, los, pedagang kaki lima yang ada di Pasar Tanjung selama tahun 2014 periode bulan Januari s/d Oktober dikalikan dengan Tarif pungutan retribusi yang ditetapkan.

Selain itu suatu potensi Retribusi Pasar dapat dilihat dari fasilitas pasar, Jenis dagangan, jumlah petugas pemungut, jumlah toko/los, tarif retribusi, luas pasar dan area kaki lima, dan data penerimaan retribusi tahunan. Dengan analisis potensi retribusi pasar ini akan mengetahui daya pengelolaan potensi yang ada di pasar Tanjung sudah maksimal atau belum maksimal. Karena dari realita yang ada realisasi penerimaan retribusi pasar di pasar Tanjung dua tahun belakangan ini yaitu tahun 2012-2013 masih kurang maksimal mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kepada Dinas Pasar Kabupaten Jember.

BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang meliputi pendekatan dan tipe penelitian, objek penelitian, definisi operasional variabel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan adanya metode penelitian. Hal ini dikarenakan metode penelitian dijadikan sebagai landasan untuk memperoleh data-data dalam rangka mencari kebenaran ilmiah terhadap masalah yang dihadapi dalam penelitian pada dasarnya

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2008:2)

3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Menurut Bungin (2008:3) menjelaskan bahwa ada dua pendekatan penelitian, yaitu penelitian kuantitatif. Dan ada dua format penelitian kuantitatif berdasarkan paradigma dominan dalam metodologi penelitian kuantitatif dibagi menjadi 2 (dua), yaitu format deskriptif dan format eksplanasi. Data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif.

Menurut Bungin (2008:36) dalam bukunya metodologi kuantitatif menjelaskan bahwa tujuan dari penelitian kuantitatif deskriptif adalah untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variable yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu terhadap apa yang terjadi. Sugiyono (2002:6) juga mendefinisikan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variable mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable yang lain”.

Menurut Singarimbun dan Effendi (1989:265) metode yang sering dipakai untuk analisis data deskriptif kuantitatif adalah termasuk kelompok kategorikal, metode ini umumnya lebih populer menggunakan analisa perhitungan untuk mendapatkan prosentase.

Berdasarkan paparan pernyataan diatas bahwa penelitian deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini berusaha menggambarkan dan menganalisis data melalui data sekunder secara utuh mengenai potensi retribusi Pasar Tanjung di Kabupaten Jember.

3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Untuk itu penelitian ini memilih lokasi di Kabupaten Jember dengan situs penelitian 2 lokasi.

1. Di Kantor Dinas Pasar Kabupaten Jember, yang berlokasi di Jalan PB Sudirman No. 11 Kabupaten Jember.
2. Di Kantor Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember. Yang terletak di Jalan Samanhudi No. 442 Kabupaten Jember, dimana tujuan pemilihan lokasi ini dikarenakan Dinas Pasar Pasar Tanjung merupakan lembaga yang mengelola retribusi pasarnya khususnya pasar

Tanjung, yang mana pasar Tanjung adalah pasar kelas utama yang memiliki pendapat retribusi tertinggi dari 31 unit pasar lainnya.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian merupakan jangka waktu peneliti melakukan penelitian. Waktu penelitian awal dilakukan pada bulan Agustus s/d September 2014. Sedangkan penelitian selanjutnya dilakukan pada bulan Oktober s/d Desember 2014.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi Penelitian

Bungin (2008:99) mendefinisikan pengertian populasi yaitu bahwa populasi penelitian adalah keseluruhan (*universum*) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian.

Selanjutnya Bungin menyatakan bahwa populasi keberadaannya amat beragam. Dilihat dari penentuan sumber data populasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu populasi terbatas dan populasi tak terbatas.

- a. Populasi terbatas adalah populasi yang memiliki sumber data yang jelas batas-batasnya secara kuantitatif.
- b. Populasi tak terhingga adalah populasi yang memiliki sumber data yang tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara kuantitatif.

Dalam penelitian ini menggunakan populasi terbatas yaitu Jumlah Pedagang (Los, Kios, dan Pedagang kaki lima) yang ada di Pasar Tanjung di tahun 2014 yang berjumlah 1807 pedagang yang terdiri dari pedagang di LTU I sebanyak 104 pedagang, LTU II sebanyak 773 pedagang, LTU III sebanyak 154 pedagang, LTU IV sebanyak 220 pedagang, LTU V sebanyak 556 pedagang, dengan rician sebagai berikut :

Tabel 3.1 Rincian jumlah pedagang di Pasar Tanjung berdasarkan klasifikasi Letak Tata Usaha (LTU) beserta luasnya tahun 2014

No	Letak Tata Usaha (LTU)	Luas (m ²)	Jumlah (pedagang)
1	LTU I berjumlah 104 pedagang	6	32
		12	22
		16	36
		20	14
2	LTU II berjumlah 773 pedagang	3	55
		4	92
		6	221
		12	269

		14	1
		16	91
		18	4
		20	38
		22.5	1
		56	1
3	LTU III berjumlah 154 pedagang	2	11
		3	8
		3.75	4
		4	40
		4.5	1
		5.5	15
		6	62
		6.25	1
		6.8	1
		7.5	11
4	LTU IV berjumlah 220 pedagang	2	13
		3	55
		4	51
		5	24
		6	77
5	LTU V berjumlah 556 pedagang	1.5	359
		2	197
Total Pedagang			1807

Sumber: Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung, data diolah.

3.3.2 Sampel Penelitian

Sampel adalah proses pemilihan beberapa objek atau unsur dalam populasi untuk digunakan sebagai sampel yang diteliti sifat-sifatnya (Suparmoko, 1999:33). Senada dengan yang diungkapkan oleh Arikunto (2006:131) bahwa sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti.

Bungin (2008:112) juga menjelaskan bahwa sampel adalah wakil semua unit strata dan sebagainya yang ada di dalam populasi. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan sampel dalam suatu penelitian yaitu derajat keseragaman, derajat kemampuan peneliti mengenai sifat-sifat khusus populasi, presisi yang dikehendaki penelitian dan penggunaan teknik sampling yang tepat.

Bungin (2008:115) juga menjelaskan bahwa teknik pengambilan sampel terdiri dari *Nonprobability Sampling* dan *Propability Sampling*. Teknik *Propability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama kepada setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sampel dalam penelitian ini menggunakan *Disproportionate Stratified Random Sampling*, yaitu adalah teknik yang heterogenitas dalam populasi yang ketidakproporsionalan penentuan sample didasarkan pada pertimbangan jika anggota populasi berstrata.

Gay dan diehl (1992:132) menyatakan bahwa semakin banyak sampel yang diambil maka akan semakin representative dan hasilnya dapat digeneralisir,

dan jika penelitian yang bersifat deskriptif, maka sampel minimum adalah 10% dari jumlah populasi.

Peneliti di dalam penelitian ini mengambil sampel 10% dari jumlah populasi yang ada yaitu sebesar 181 pedagang yang ada di Pasar Tanjung dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2 Jumlah sampel pedagang di Pasar Tanjung

No	Letak Tata Usaha (LTU)	Luas (m2)	Jumlah (pedagang)
1	LTU I	6	3
		12	2
		16	3
		20	2
2	LTU II	3	5
		4	9
		6	22
		12	24
		14	1
		16	9
		18	1
		20	4
		22.5	1
		56	1
3	LTU III	2	1
		3	1
		3.75	1
		4	3
		4.5	1
		5.5	2
		6	3
		6.25	1
		6.8	1
7.5	2		
4	LTU IV	2	1
		3	5
		4	5
		5	3
		6	8
5	LTU V	1.5	36
		2	20
Total Pedagang			181

Sumber: Hasil penelitian

Sampling frame yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan proporsi letak, karena proporsi letak ini sekaligus mencerminkan proporsi tarif, walaupun responden yang diambil secara ensiden atau acak tetapi jumlah tetap sesuai dengan proporsinya.

3.4 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan definisi variabel-variabel yang akan diteliti secara operasional bermanfaat untuk mengarahkan kepada pengukuran atau pengamatan terhadap variabel-variabel yang akan diteliti serta untuk

pengembangan instrumen. Berdasarkan definisi oprasional yang tepat, maka ruang lingkup atau pengertian variabel-variabel yang diteliti menjadi terbatas dan penelitian akan lebih fokus (Sostroasmoro, 2011:64).

Penelitian ini dioprasionalkan untuk menganalisis potensi retribusi Pasar Tanjung di Kabupaten Jember di tahun 2014. Mahmudi (2010:73) dalam bukunya Manajemen Keuangan Daerah menjelaskan untuk menghitung Potensi Retribusi Pasar terdapat beberapa indikator-indikator :

a. Fasilitas Pasar

Fasilitas pasar merupakan segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan kegiatan yang ada di Pasar Tanjung Kabupaten Jember. Fasilitas di Pasar Tanjung terdiri dari gerobak, meja/kursi, toilet, musholah, kotak P3K, alat pemadam kebakaran, transportasi dan lain sebagainya yang mendukung dan terkait dalam kegiatan di pasar.

b. Jenis Dagangan

Jenis dagangan yang ada di pasar terutama Pasar Tanjung Kabupaten Jember terdiri dari pedagang sayur mayur, pedagang kain, alat-alat keperluan rumah tangga, elektronik, dan berbagai dagangan lainnya. Pasar Tanjung terdiri dari dua lantai di lantai satu menjual berbagai kebutuhan alat-alat rumah tangga, kain, dan alat-alat elektronik. Di lantai dua pasar Tanjung menjual berbagai sayuran, ikan, daging, kain, pakaian dan bahan bahan makanan rumah tangga lainnya

c. Jumlah Petugas Pemungut

Petugas pemungut di pasar bertugas untuk memungut atau menarik retribusi kepada para pedagang yang ada di pasar. Besar jumlah petugas pemungut mempengaruhi efisiensi pemungutan retribusi. Jumlah petugas pemungut di pasar tanjung berjumlah 10 orang yang sudah menempati wilayah-wilayah yang telah ditetapkan untuk bertugas menarik pungutan retribusi ke pedagang. Bagian juru pungut harian di Pasar Tanjung dibagi menjadi 4 (empat) shift yaitu kelompok I bekerja mulai pukul 07.00 s.d 14.00 WIB, kelompok II dari pukul 15.00 s.d 17.00 WIB, kelompok III dari pukul 18.00 s.d 20.00 WIB. Dan kelompok IV 02.00 s.d 06.00 WIB.

d. Tarif Retribusi

Tarif retribusi yang dikenakan kepada para pedagang yang ada di pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 tahun 2011 telah mengatur besar tarif yang dibebankan kepada para

pedagang di Pasar Tanjung yang termasuk pasar utama di Kabupaten Jember, yang digolongkan menjadi 5 (lima) golongan LTU yang masing-masing mendapatkan tarif yang berbeda setiap meternya, yaitu sebagai berikut:

1. LTU I : toko/kios yang menghadap ke luar dengan tarif Rp. 400,-/m²/hari
2. LTU II : toko/kios yang menghadap ke dalam dengan tarif Rp. 350,-/m²/hari
3. LTU III : toko/kios, bedak los tertutup dengan tarif Rp. 250,-/m²/hari
4. LTU IV : los terbuka di dalam pasar dengan tarif Rp. 200,-/m²/hari
5. LTU V : halaman pasar di dalam area pasar dengan tarif Rp. 2500,-/m²/hari.

e. Jumlah Kios dan Los

Besarnya jumlah los dan kios di pasar mempengaruhi besarnya penerimaan Retribusi Pasar yang akan diperoleh. Seperti penjelasan di buku Manajemen Keuangan Daerah milik Mahmudi (2010) menjelaskan rumus perhitungan potensi menggunakan jumlah los dan kios yang ada, jadi jumlah los dan kios berpengaruh dengan penerimaan retribusi yang akan didapat. Jumlah Kios/los di Pasar Tanjung di tahun 2013-2014 ini sejumlah 1807 pedagang terdiri dari 877 pedagang toko/kios.374 pedagang bedak/los, dan 556 pedagang lesehan/PKL.

f. Luas Pasar dan Area Kaki Lima

Luas pasar dan area kaki lima berpengaruh terhadap jumlah pedagang yang ada di pasar. Semakin luas area yang ada dipasar semakin besar pula daya tampung pedagang yang ada. Ini menjadikan kapasitas pedagang yang menempati pasar semakin banyak dan bervariasi. Luas Pasar di Pasar Tanjung Kabupaten Jember seluruhnya adalah 25.105 m².

g. Data Penerimaan Retribusi Tahunan

Laporan data penerimaan retribusi tahunan berguna untuk mengidentifikasi pertumbuhan penerimaan yang akan diperoleh dari tahun ke tahun. Sehingga dapat menganalisis perkembangan yang terjadi dan dapat mengoptimalkan potensi penerimaan retribusi yang ada secara maksimal. Data penerimaan Retribusi Pasar di Pasar Tanjung Kabupaten Jember yang digunakan adalah data di tahun 2014.

3.5 Data dan Sumber Data

Bungin (2008:122) menjelaskan sumber data penelitian adalah Subjek darimana data tersebut diperoleh, diambil, dan dikumpulkan. Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data yaitu:

1. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu data yang berasal dari buku-buku, literatur-literatur, dokumen-dokumen, laporan-laporan maupun arsip-arsip resmi yang dapat mendukung penelitian ini. Dalam penelitian ini data sekunder yang diambil adalah Laporan Target dan realisasi penerimaan hasil Retribusi Pasar, dan data-data yang terkait lainnya dengan komponen-komponen yang membentuk retribusi pasar terutama di pasar Tanjung Kabupaten Jember. Sehingga data sekunder berupa dokumen-dokumen terkait dengan potensi penerimaan retribusi pasar yang diperoleh dari berbagai sumber menjadikan data yang sangat penting bagi penelitian ini.

2. Sumber data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung pada sumber data yaitu dari informan yang bersangkutan dengan cara wawancara dan pengamatan atau observasi pada informan. Data primer dimaksudkan untuk mendukung analisa yang dilakukan dengan data sekunder.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dimaksudkan sebagai cara untuk memperoleh data dalam penelitian yang mendukung dan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut (Bungin, 2008:123) :

1. Metode Angket

Metode angket ini sering disebut dengan metode kuesioner, yang merupakan serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian dikirim untuk diisi responden. Setelah diisi, angket dikirim kembali atau dikembalikan ke peneliti. Angket dalam penelitian ini cenderung ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat di dalam permasalahan dari objek yang diteliti.

2. Metode Observasi

Menurut Bungi (2008:126) metode observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengamati objek yang akan diteliti dan kemudian dianalisis secara seksama. Pengamatan ini dilakukan terhadap pelaksanaan retribusi pasar di Kabupaten Jember khususnya pasar Tanjung. Serta mengamati

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan dokumentasi menurut Usman dan Akbar (2003:73) adalah suatu pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dimana data yang terkumpul dengan teknik ini merupakan data-data sekunder. Data-data yang berupa buku, jurnal, majalah, dan juga dokumen-dokumen yang terkait serta dari internet yang mendukung dalam memperoleh data penelitian. Data yang diperoleh dengan teknik dokumentasi dikumpulkan dengan mendatangi sumber data yang berupa data sekunder tentang laporan penerimaan retribusi pasar yang didapatkan di Dinas Pasar Kabupaten Jember khususnya penerimaan retribusi di pasar Tanjung Kabupaten Jember. Selain data-data tersebut data sekunder yang digunakan juga berupa data-data pendukung untuk menganalisis potensi penerimaan retribusi pasar yang ada di pasar Tanjung Kabupaten Jember, yaitu berupa buku-buku, jurnal dan referensi-referensi yang terkait dengan penelitian ini.

3.7 Teknik Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data, kemudian data dianalisa, kerangka analisa biasanya mengandung rencana apa yang akan dilakukan setelah data selesai dikumpulkan dan dibersihkan. Rencana analisis yang baik bahkan memuat variabel utama yang akan dianalisis, dan langkah-langkah analisis mulai dari univariat sampai multivariat (Junadi, 1995:4)

Sofian Effendi juga menyatakan dalam buku Singarumbun (1989:263) bahwa analisis data adalah prose penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih muda dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah deskriptif analisis yang merupakan deskripsi mengenai potensi penerimaan retribusi pasar di pasar Tanjung Kabupaten Jember tahun 2014.

Dilihat dari latar belakang yang ada di penelitian ini bahwa turunnya hasil penerimaan retribusi pasar yang ada dapat dipengaruhi karena pengelolaan potensi yang kurang maksimal. Rumus untuk menghitung potensi retribusi pasar umum

menurut Mahmudi (2010:73) Untuk menerapkan perhitungan dalam memperoleh potensi retribusi Pasar Tanjung, langkah-langkahnya sebagai berikut :

1. Menentukan Pasar yang akan diteliti potensi retribusi pasarnya. (Pasar Tanjung di Kabupaten Jember)
2. Melakukan observasi untuk memperoleh data jumlah kios, jumlah los, jumlah kaki lima, dan tarif pungutan retribusi dari masing-masing.
3. Menghitung potensi retribusi pasar

Yang dinyatakan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Potensi} = [(\text{Jml. Kios} \times \text{TR}) + (\text{Jml. Los} \times \text{TR}) + (\text{Jml. K5} \times \text{TR})] \times [\sum \text{Aktivitas Pasar Sebulan} \times 12]$$

Keterangan :

Jml. Kios = jumlah kios

Jml. Los = jumlah los

Jml. K5 = jumlah pedagang kaki lima

TR = tarif retribusi

Mahmudi (2011:74) menjelaskan Aktivitas Pasar ialah jumlah aktivitas pasar ditentukan oleh banyaknya hari pasaran sebagai contoh pada masyarakat Jawa dikenal lima hari pasaran, yaitu : Kliwon, Legi, Pahing, Pon dan wage. Berdasarkan hari pasaran aktivitas pasar dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu :

- Pasar Buka setiap hari, aktivitas pasar sebanyak 350 hari dalam satu tahun.
- Pasar buka dua kali dalam lima hari pasaran, sehingga dalam satu tahun terdapat kurang lebih 144 hari pasaran.
- Pasar buka satu kali dalam satu pekan pasaran. Sehingga terdapat kurang lebih 72 hari pasaran.

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Deskripsi Daerah Penelitian

a. Sejarah Kabupaten Jember

Kabupaten Jember berpedoman pada sejarah pemerintahan colonial Belanda, yaitu berdasarkan pada Staatsblad nomor 322 tanggal 9 Agustus 1928 berlaku tanggal 1 Januari 1929 sebagai dasar hukum. Dalam Staatsblad 322 tersebut, dijelaskan Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan ketentuan tentang penataan pemerintahan desentralisasi di Wilayah Propinsi Jawa Timur, antara lain dengan REGENSCHAP DJEMBER. Diterbitkan oleh Sekretaris Umum Pemerintah Hindia Belanda (De Aglemeene Secretaris) G.R. Erdbrink, tanggal 21 Agustus 1928. Konsideran Staatsblad Nomor 322 tersebut, menunjukkan Kabupaten Jember menjadi kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri dilandasi Yuridis Konstitusional dan Pertimbangan Politis Sosiologi. Sesuai peraturan perundang-undangan, agar semua orang mengetahui maka ketentuan penataan kembali pemerintahan desentralisasi Wilayah Kabupaten Jember, disebut regenschap, dimuat juga dalam Lembaran Negara Pemerintahan Hindia Belanda. Staatsblad nomor 322 tahun 1928 ditetapkan di Cipanas oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda, SK Nomor : IX tanggal 9 Agustus 1928. Perubahan sebagai berikut : Pemerintah Regenschap Jember terbagi 7 Wilayah Distrik, tanggal 1 Januari 1929 sejak berlakunya Staatsblad Nomor 46 tahun 1941, tanggal 1 Maret 1941 maka Wilayah Distrik dipecah-pecah menjadi 25 Onderdistrik, yaitu :

DISTRİK	ONDERDISTRİK
Jember	Jember, Wirolegi, Arjasa
Kalisat	Ledokombo, Sumberjambe
Rambipuji	Panti, Mangli dan Jenggawah
Mayang	Silo, Mumbulsari dan Tempurejo
Tanggul	Sumberbaru dan Bangsalsari
Puger	Kencong, Gumukmas dan Umbulsari
Wuluhan	Ambulu dan Balung

Otonomi Daerah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, tanggal 1 Januari 2001 Pemerintah Kabupaten Jember melakukan penataan kelembagaan dan struktur organisasi, termasuk dihapusnya Kota Administrasi Jember. Termasuk Pembantu Bupati berubah menjadi Kantor Koordinasi Camat. Pemerintah Kabupaten Jember telah berhasil menata struktur organisasi dan kelembagaan hingga tingkat pemdes/kelurahan. Tanggal 1 Januari 2001 Kabupaten Jember memasuki paradigma baru dalam sistem pemerintah yaitu dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi atau Otonomi Daerah.

b. Letak Geografis

Kabupaten Jember memiliki luas 3.293,34 km², dengan ketinggian antara 0 – 3.330 mdpl. Iklim Kabupaten Jember adalah tropis dengan kisaran suhu antara 23°C – 32°C. Bagian selatan wilayah Kabupaten Jember adalah dataran rendah

dengan titik terluarnya adalah Pulau Barong. Pada kawasan ini terdapat Taman Nasional Meru Betiri yang berbatasan dengan wilayah administratif Kabupaten Banyuwangi. Bagian barat laut (berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo adalah pegunungan, bagian dari Pegunungan Iyang, dengan puncaknya Gunung Argopuro (3.088 m). Bagian timur merupakan bagian dari rangkaian Dataran Tinggi Ijen. Jember memiliki beberapa sungai antara lain Sungai Bedadung yang bersumber dari Pegunungan Iyang di bagian Tengah, Sungai Mayang yang bersumber dari Pegunungan Raung di bagian timur, dan Sungai Bondoyudo yang bersumber dari Pegunungan Semeru di bagian barat.

c. Batas Wilayah

Secara kewilayahan, Kabupaten Jember berbatasan dengan daerah disekitarnya. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Jember antara lain :

- a) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi.
- b) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lumajang.
- c) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Bondowoso.
- d) Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.

d. Keadaan Cuaca

Kabupaten Jember mempunyai suhu udara maksimum 32,4 C dan suhu udara minimum 21,6 C. sedangkan tekanan udara rata-rata adalah 1008,74 mbs dengan kelembabab udara 79%. Kecepatan angin berkisar 4 knot dengan arah angin 188 serta beriklim panas.

e. Penduduk

Mayoritas penduduk Kabupaten Jember terdiri dari suku Jawa dan suku Madura, dan sebagian besar beragama islam. Selain itu terdapat warag Tionghoa dan suku Osing. Rata-rata penduduk jember adalah masyarakat pendatang. Suku Madura dominant di Jember bertempat tinggal didaerah utara dan Suku Jawa bertempat tinggal di daerah selatan dan pesisir pantai. Bahasa Jawa dan Madura digunakan dibanyak tempat sehingga umum bagi masyarakat di Jember menguasai dua bahasa daerah tersebut dan juga saling berpengaruh tersebut memunculkan beberapa ungkapan khas Jember. Perampuran kedua kebudayaan Jawa dan Madura di Kabupaten Jember melahirkan satu kebudayaan yang baru bernama budaya Pendalungan. Masyarakat Pendalungan di Jember mempunyai karakteristik yang unik sebagai hasil dari penetrasi kedua budaya tersebut. Kesenian Can Macanan Kaduk merupakan satu hasil budaya masyarakat Pendalungan yang masih

bertahan sampai sekarang di Kabupaten Jember. Kabupaten Jember berpenduduk 2.529.967 jiwa (JDA, BPS 2013) dengan kepadatan rata-rata 787,47 jiwa/km²

f. Kesehatan

Ketersediaan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan puskesmas keliling merupakan sarana penunjang kesehatan masyarakat Jember. Dan adanya dukungan dari tenaga ahli dibidang kesehatan. Jumlah sarana kesehatan di rumah sakit umum, puskesmas, dan puskesmas keliling di Kabupaten Jember sebanyak 11 Rumah Sakit Umum, 49 Puskesmas, dan 49 Puskesmas Keliling. Dan tenaga kerja yang terdiri dari Dokter, Bidan, Klinik KB, kelompok KKBS masing-masing sebanyak 79 orang Dokter, 319 orang Bidan, 107 orang Klinik KB, dan 1589 orang kelompok KKBS.

4.1.2 Sejarah Singkat Dinas Pasar Kabupaten Jember

Di tahun 1991 dibangunnya Dinas Pasar Kabupaten Jember, namun pada tahun tersebut masih bernama Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pasar (UPTD), dan masih dibawah naungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Dalam perkembangannya pada tanggal 1 Januari 2003 UPTD diubah namanya menjadi Bidang Prasarana dan Prasarana Pasar akan tetapi masih dibawah naungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, di tanggal 1 Januari 2009 UPTD pasar berdiri sendiri yang berkerja mandiri menjadi Dinas Pasar sampai sekarang ini.

4.1.3 Struktur Organisasi

Di dalam suatu instansi terdapat struktur organisasi, dan struktur organisasi yang dimaksudkan untuk membagi pekerjaan dari struktur organisasi akan terlihat tugas dan fungsi masing-masing bagian dan kepada siapa bagian pekerjaan tersebut harus dipertanggungjawabkan pelaksanaan pekerjaannya.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Sub Bagian Umum dan Keuangan
4. Sub Bagian Perencanaan
5. Bidang Retribusi
 - a. Seksi Penetapan
 - b. Seksi pembukuan
6. Bidang Perawatan, Keamanan dan Ketertiban

- a. Seksi Kebersihan
- b. Seksi Pemeliharaan
- c. Seksi Keamanan dan Ketertiban

7. Kelompok Jabatan Fungsional

8. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Adapun struktur Dinas Pasar Kabupaten Jember dapat dilihat dalam gambar 1.1 berikut ini :

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember Tahun 2014

Berdasarkan gambar struktur organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember dapat diketahui tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

a. Tugas Kepala Dinas Pasar sebagai berikut,

- 1) Membina, mengelola, dan mengembangkan Dinas Pasar
- 2) Menyelenggarakan jasa dan manfaat umum di bidang kegiatan pasar bagi masyarakat
- 3) Menyelenggarakan fasilitas serta kebutuhan saran dan prasarana pasar lainnya.
- 4) Menyediakan tempat yang sehat dan memenuhi syarat untuk berjualan dan berbelanja bagi masyarakat
- 5) Menyelenggarakan penarikan/pungutan retribusi sewa dan jasa-jasa lainnya sesuai peraturan perundang-undangan
- 6) Menyelenggarakan kebersihan, keindahan, ketertiban, dan keamanan lingkungan pasar

b. Fungsi Kepala Dinas Pasar sebagai berikut,

- 1) Perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan
- 2) Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- 3) Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

3.a. Tugas Sekretariat yaitu melaksanakan administrasi dan urusan rumah tangga dinas, pelaporan, kearsipan, dan dokumentasi terhadap seluruh unsure lingkup Dinas dan merencanakan program kerja Dinas dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3.b. Fungsi sekretariat sebagai berikut

- 1) Pemberian pelayanan administrasi dan teknis yang menyangkut urusan umum, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan perbekalan
- 2) Pembantuan pengkoordinasian rencana kegiatan dan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pasar
- 3) Pelaksanaan kegiatan tata usaha umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan
- 4) Pelaksanaan tugas-tugas penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan serta aktivitas peningkatan aparatur dinas
- 5) Pelaksanaan tugas protokoler dan perjalanan dinas
- 6) Pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas Pasar
- 7) Pelaksanaan urusan keamanan ke dalam terhadap personel, material, financial dan informasi
- 8) Pengusahaan terciptannya tertib program, tertib anggaran, tertib administrasi, tertib pelaksanaan dan tertib pengawasan bagi seluruh satuan organisasi dinas

Di dalam sekretariat terdapat dua sub bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Keuangan, Sub Bagian Perencanaan

3. Sub Bagian Umum dan Keuangan

a. Tugas Sub Bagian Umum dan Keuangan yaitu melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan, kehumasan, keprotokoleran dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

b. Fungsi Sub Bagian Umum dan Keuangan sebagai berikut

- 1) Pelaksanaan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan dinas
- 2) Pelaksanaan tata naskah dinas dan tata kearsipan

- 3) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan protocol
- 4) Pengurusan perbaikan kantor dan bangunan lain milik dinas
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan
- 6) Pengurusan kendaraan dan alat-alat angkutan lain milik dinas
- 7) Pelaksanaan persiapan upacara, pertemuan dan rapat dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu
- 8) Penyelenggaraan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat
- 9) Pemindahan, cuti, beban tugas, kenaikan gaji berkala, pembinaan karier dan pension pegawai di lingkup dinas
- 10)Penyiapan bahan dan melakukan upaya dalam rangka meningkatkan disiplin dan kesejahteraan pegawai serta pengembangan pendidikan dan latihan pegawai di lingkup dinas
- 11)Penyusunan formasi pegawai di lingkungan Dinas Pasar
- 12)Pelaksanaan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai
- 13)Penyusunan rencana kebutuhan barang perlengkapan dan perbekalan
- 14)Pelaksanaan tata usaha barang peralatan dan perbekalan
- 15)Pelaksanaan pengadaan, pembinaan, penggunaan, penggudangan serta pemeliharaan barang peralatan dan perbekalan
- 16)Penyiapan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi barang peralatan dan perbekalan
- 17)Penyiapan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun yang dikuasai oleh dinas
- 18)Penghimpunan dan mengelola bahan untuk penyusunan anggaran
- 19)Penyiapan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja dinas
- 20)Pengelolaan tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja dinas
- 21)Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi
- 22)Pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai
- 23)Pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya lain sebagai pengeluaran dinas
- 24)Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan

4. Sub Bagian Perencanaan

a. Tugas Sub Bagian Perencanaan yaitu melaksanakan penyusunan rencana program kegiatan anggaran, laporan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Fungsi Sub Bagian Perencanaan sebagai berikut,

b.1) Pelaksanaan perencanaan terhadap pendapatan retribusi pasar

b.2) Melakukan perencanaan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi pasar

b.3) Penyusunan naskah rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang penerimaan retribusi pasar

b.4) Pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan dinas

b.5) Pelaksanaan analisa, Evaluasi, dan pengendalian sebagai bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

5. Bidang Retribusi

a. Bidang Retribusi mempunyai tugas menyusun program perencanaan teknis pendapatan retribusi pasar, pengumpulan, mengolah data dan melaksanakan tagihan rekening sesuai dengan daftar rekening sesuai dengan daftar rekening yang harus ditagih dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

b. Fungsi Bidang Retribusi sebagai berikut,

b.1) Pelaksanaan tagihan rekening sesuai daftar rekening yang harus ditagih yang telah diterbitkan

b.2) Penyusunan secara sistematis dan mengolah data di bidang pendapatan dan jumlah pedagang di lingkungan pasar

b.3) Penyelenggaraan perencanaan semua penerimaan atau pendapatan pasar

b.4) Pembukuan penerimaan pada buku harian, bulanan, dan tahunan

b.5) Pengadaan usaha-usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan pasar

Di dalam Bidang Retribusi terdapat seksi-seksi yang terdiri dari Seksi Penetapan dan Seksi Pembukuan.

3.b.6. Seksi Penetapan

3.b.6.a. Tugas Seksi Penetapan yaitu melaksanakan urusan perhitungan dan penetapan retribusi hasil penerimaan maupun

Pendapatan Asli Daerah terhadap pengelolaan pasar dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Retribusi

3.b.6.b. Fungsi Seksi Penetapan sebagai berikut

3.b.6.b.1) Pelaksanaan perhitungan dan penetapan retribusi pasar

3.b.6.b.2) Pelaksanaan penetapan, penerbitan, surat-surat perijinan serta menyimpan arsip yang berkaitan dengan penetapan

3.b.6.b.3) Pelaporan semua hasil penerimaan dan pendapatan terhadap pengelolaan pasar

3.b.7. Seksi Pembukuan

3.b.7.a.1.a. Tugas Seksi Pembukuan yaitu melaksanakan urusan pembukuan terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran terhadap benda berharga dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3.b.7.a.1.b. Fungsi Seksi Pembukuan sebagai berikut,

3.b.7.a.1.b.1) Penyelenggaraan pembukuan terhadap segala hasil pendapatan dan pengelolaan pasar

3.b.7.a.1.b.2) Pembukuan persediaan karcis, pengeluaran karcis dan formulir untuk pungutan retribusi dan pendapatan lainnya

3.b.7.a.1.b.3) Penerimaan dan pembukuan hasil laporan penerimaan dan pendapatan pasar

3.b.7.a.1.b.4) Penghitungan kebutuhan pengadaan benda berharga

3.b.7.a.1.b.5) Penerimaan dan pencatatan tanda terima benda berharga

3.b.7.a.1.b.6) Pelaksanaan pembukuan terhadap bukti penerimaan, pengeluaran, dan pengambilan benda berharga

3.b.7.a.1.b.7) Pengevaluasian realisasi penggunaan benda berharga di unit-unit pasar

3.b.7.a.1.b.8) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban.

3.b.8. Bidang Perawatan, Keamanan, dan Ketertiban

3.b.8.a.1.a.1.a.

Tugas

Bidang Perawatan, keamanan, dan ketertiban yang melaksanakan kebersihan, pemeliharaan, serta perawatan sarana dan prasarana serta meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan pasar dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

3.b.8.a.1.a.1.b.

Fungsi

Bidang Perawatan, Keamanan, dan Ketertiban sebagai berikut,

- 1) Pelaksanaan kebersihan dan pemeliharaan serta perawatan sarana fisik
- 2) Penyelenggaraan perencanaan dan melakukan usaha kebersihan dan pemeliharaan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- 3) Pelaksanaan pemeliharaan gedung pasar, air, dan penerangan serta fasilitas milik dinas
- 4) Penyelenggaraan serta bertanggung jawab tentang pengangkutan dan pembuangan sampah dari pasar ke tempat penampungan sementara
- 5) Pengadaan perbaikan dan pengaturan saluran air dan penerangan dalam pasar
- 6) Bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban pasar
- 7) Pelaksanaan usaha-usaha untuk meningkatkan kewaspadaan serta menjaga keamanan stabilitas pasar
- 8) pelaksanaan kegiatan dalam rangka ketertiban umum dan pemantapan ketertiban pasar

Bidang Perawatan, Keamanan dan Ketertiban terbagi atas tiga seksi yaitu Seksi Kebersihan, Seksi Pemeliharaan, dan Seksi Keamanan dan Ketertiban.

3.b.9. Seksi Kebersihan

1.a.1.a.

Tugas Seksi Kebersihan yaitu melaksanakan

urusan kebersihan pasar, saluran pembuangan dan pengangkutan sampah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perawatan, Keamanan, dan Ketertiban.

b. Fungsi Seksi Kebersihan sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan usaha dalam menggalakan dan membina kebersihan pasar.
- 2) Penyelenggaraan pembersihan got, saluran pembuangan serta kamar mandi atau WC milik Dinas.
- 3) Pelaksanaan pembersihan sampah dalam pasar
- 4) Penyelenggaraan serta bertanggung jawab tentang pengangkutan sampah dari pasar ketempat penampungan sementara

3.b.10. Seksi Pemeliharaan

4.a. Tugas Seksi Pemeliharaan yaitu melaksanakan perencanaan pemeliharaan bangunan pasar dan fasilitas lain dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perawatan, Keamanan, dan Ketertiban.

4.b. Fungsi Seksi Pemeliharaan sebagai berikut:

- 4.b.1) Penyelenggaraan perencanaan dan melakukan usaha untuk mengadakan pemeliharaan bangunan pasar dan bangunan fasilitas lainnya.
- 4.b.2) Pengadaan pemeliharaan dan peralatan bedak atau los pasar
- 4.b.3) Pemeliharaan dan menjaga kerapian bangunan pasar
- 4.b.4) Pengadaan inventarisasi bangunan atau stand dan bedak pasar serta peralatan yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan.

11. Seksi Keamanan dan Ketertiban

- a. Tugas Seksi Keamanan dan Ketertiban adalah melaksanakan keamanan di lingkup pasar maupun penertiban pedagang pasar dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perawatan, Keamanan, dan Ketertiban.
- b. Fungsi Seksi Keamanan dan Ketertiban sebagai berikut:
 - 1) Pertanggung jawaban terhadap keamanan pasar
 - 2) Pelaksanaan usaha-usaha dalam rangka meningkatkan keamanan di lingkungan pasar
 - 3) Pemberian pertimbangan terhadap legalitas yang berhubungan dengan keamanan pasar
 - 4) Pelaksanaan usaha-usaha untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap pencurian dan bahaya kebakaran
 - 5) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian terhadap ketertiban pedagangan di dalam pasar

- 6) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka ketertiban umum dan pemantaban ketertiban dalam pasar
- 7) Pelaksanaan pemindahan para pedagang yang berada di luar lokasi ke dalam pasaryang telah disediakan
- 8) Petanggung jawaban terhadap ketertiban pasar
- 9) Pelaksanaan tindakan awal penyegelan dan pembukaan kembali bedak / stand serta fasilitas pasar lainnya setelah memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

12. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas yaitu melaksanakan tugas teknis Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

13. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

- a. Tugas UPT Dinas Pasar yaitu melaksanakan urusan rumah tangga di bidang Pendapatan Asli Daerah serta melaksanakan tugas pembantuan berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- b. Fungsi UPT Dinas Pasar sebagai berikut:
 - 1) Penyusunan rencana program bidang Pendapatan Asli Daerah pada sektor retribusi pasar
 - 2) Pelaksanaan kebersihan lingkup pasar, keamanan, dan ketertiban padagang pasar
 - 3) Pelaksanaan pembinaan terhadap pedagang pasar

Sektor perdagangan Kabupaten Jember merupakan sektor yang banyak di kembangkan oleh masyarakatnya. Perdagangan adalah usaha yang penting dalam menyerap tenaga kerja, dimana pemerintah Kabupaten Jember memberikan fasilitas serta pelayanan kepada masyarakat di dalam sektor perdagangan. Salah satu upaya tersebut adalah menyediakan tempat sebagai tempat untuk melakukan kegiatan atau aktivitas-aktivitas perdagangan yang berupa pasar. Pasar Daerah yang dikelola oleh Dinas Pasae Kabupaten Jember. Jumlah pasar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jember adalah 31 unit pasar daerah yang terdiri dari 4 (empat) klasifikasi kelas pasar, yang meliputi : pasar kelar utama atau pasar induk sebanyak 1 pasar, pasar kelas I sebanyak 10 pasar, pasar kelas II sebanyak 18 pasar dan pasar kelas III sebanyak 2 pasar.

4.1.4 Profil Pasar Tanjung

Pasar Tanjung adalah pasar tradisional terbesar di Kabupaten Jember yang tepatnya berada di Kecamatan Kaliwates. Pasar Tanjung yang berada di pusat kota merupakan pasar kelas utama atau pasar induk yang melayani berbagai macam komoditi perdagangan kebutuhan masyarakat.

Ditinjau dari segi kondisi fisik tata ruang dan tingkat hunian sudah tidak mampu lagi menampung jumlah pedagang yang ada dikarenakan peningkatan aktivitas perdagangan di dalamnya. Pembentukan Pasar Tanjung didasarkan pada SK DPRGR Kabupaten Jember tanggal 20 September 1971 No. 08/IX/DPRDGR yang melaksanakan kebijakan Bupati-Kdh.Tk.II Jember dalam nota APBN tahun 1971/1972 tanggal 12 Juli 1971 dengan keputusan biaya pembangunan secara gotong-royong antara penghuni dengan pemerintah diantara biaya sebesar 25% ditanggung oleh pemerintah dan 75% ditanggung sendiri oleh penghuni atau pedagang yang menempati bangunan pasar.

Untuk melaksanakan pembangunan dibentuk tim pembangunan Pasar Tanjung berdasarkan SK Bupati tanggal 4 September 1972 No. SEK/III/35/1972 yang kemudian disempurnakan kembali SK Bupati tanggal 4 Juli 1974 No. 44/tahun 1974. Sebelum Pasar Tanjung lama dibongkar, maka tim pembangunan Pasar Tanjung Jember membuat pasar penampungan sementara yang terletak di jalan DR. Wahidin, jalan H. Samanhudi, jalan W. R. Supretman pada tanggal 19 November 1972 sebanyak 990 los. Pada tanggal 18-24 Januari 1973, para pedagang diperintahkan untuk mengosongkan Pasar Tanjung lama dan menempati pasar penampungan sementara.

Peletakan batu pertama oleh Bupati Jember dilaksanakan pada tanggal 19 April 1973 dan pada tanggal 22 April 1976. Pasar Tanjung baru mulai ditempati oleh penghuni Pasar Tanjung yang terdiri dari pedagang Pasar Tanjung dan Pasar Johar. Peresmian Pasar Tanjung oleh Bapak Menteri Dalam Negeri pada tanggal 3 Mei 1976 dan bersamaan dengan peresmian proyek-proyek pembangunan pemerintah Jember, seperti Masjid Jami' Al Baitul Amien, lapangan olahraga bulu tangkis (*sport hall*) serta pembentukan Kota Administratif Kabupaten Jember.

Pasar Tanjung Kabupaten Jember memiliki dua lantai yang beroperasi atau buka selama 24 jam. Jumlah pedagang yang ada di Pasar Tanjung sebanyak 1807 pedagang, yang terdiri dari 877 pedagang toko/kios. 374 pedagang bedak/los, dan 556 pedagang lesehan/PKL. Jenis dagangan yang diperjualbelikan meliputi perhiasan, barang elektronik, bahan pecah belah, konveksi, sembako, daging, ikan laut, sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Fasilitas yang ada dipasar

tanjung berupa tempat parkir kendaraan guna menipkan kendaraannya saat berkunjung untuk berbelanja di Pasar Tanjung.

a. Visi, Misi dan Struktur Organisasi Pasar Tanjung

Pasar Tanjung dibangun oleh pemerintah Kabupaten Jember sebagai fasilitas umum perdagangan masyarakat jember. Visi dan Misi yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- 1) Visi yang ingin dicapai yaitu: meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) khususnya Retribusi Pasar yang bertumpu pada pengelolaan yang demokratis, efisien, dan pelayanan yang prima dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.
- 2) Misi yang ingin dicapai yaitu:
 - a) Pemberdayaan peran dan partisipasi pedagang sebagai penerima fasilitas berupa sarana bangunan sebagai tempat kegiatan usahanya, guna ikut membangun dan memperbaiki sarana yang sudah ada berupa toko/ kios/ bedak yang ada di pasar.
 - b) Mewujudkan pelaksanaan mekanisme kerja yaitu dengan pengawasan dan pengendalian dalam upaya meningkatkan pendapatan dan menekan kebocoran.
 - c) Mewujudkan tertib administrasi pemasukan retribusi pasar.
 - d) Mewujudkan keterampilan dan kedisiplinan petugas selaku ujung tombak memungut retribusi pasar.
 - e) Mewujudkan kesadaran masyarakat/ pedagang untuk membayar retribusi.
 - f) Mewujudkan pelayanan yang prima kepada pengguna fasilitas pasar yang baik para pedagang maupun konsumen/ pembeli, dan
 - g) Mewujudkan peningkatan koordinasi yang baik dengan instansi terkait.

b. Struktur Organisasi Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember

Di Unit Pasar Tanjung terdapat jumlah jam kerja yang dibagi menjadi dua yaitu staf kantor (pegawai yang bekerja di kantor Pasar Tanjung) yang bekerja dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 14.00 dan untuk hari kerja dari hari senin s/d hari jumat. Sedangkan untuk staf bagian oprasioanal bekerja setiap hari karena

Pasar Tanjung buka selama 24 jam dan bagian staf ini dibagi menjadi 4 bagian, sebagai berikut :

1. Bagian juru pungut harian (petugas retribusi harian), dibagi dalam empat shift yaitu kelompok I dari pukul 07.00 s/d pukul 14.00 WIB; kelompok II dari pukul 15.00 s/d pukul 17.00 WIB; kelompok III dari pukul 18.00 s/d pukul 20.00 WIB dan kelompok IV dari pukul 02.00 s/d pukul 06.00 WIB.
2. Bagi petugas parkir dibagi menjadi dua shift yaitu kelompok I dari pukul 07.00 s/d pukul 16.00 WIB; kelompok II dari pukul 17.00 s/d pukul 20.00 WIB
3. Petugas kebersihan dibagi menjadi tiga shift yaitu kelompok I dari pukul 07.00 s/d pukul 12.00 WIB; kelompok II dari pukul 13.00 s/d pukul 15.00 WIB dan kelompok III dari pukul 16.00 s/d pukul 20.00 WIB.
4. Petugas Keamanan dibagi menjadi tiga shift yaitu kelompok I dari pukul 07.00 s/d pukul 14.00 WIB, kelompok II dari pukul 15.00 s/d pukul 21.00 WIB dan kelompok III dari pukul 22.00 s/d 06.00 WIB.

Jumlah pegawai di Unit Pasar Tanjung sebanyak 57 pegawai. Pegawai tersebut terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Rolstat atau pegawai harian dan pegawai honorer atau sukwan. Data mengenai rincian jumlah pegawai di Unit Pasar Tanjung adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Pegawai Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung

No.	Jenis Pegawai	Jumlah Pegawai
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	30
2	Rolstat	1
3	Sukwan	26
	Jumlah	57

Sumber: Unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember, 2014.

Gambar 4.2 Stuktur Organisasi Unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember



4.2 Pelaksanaan Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Agustus s/d Desember 2014 yaitu selama 5 bulan. Jumlah responden 181 pedagang .Jenis komoditi yang diperdagangkan oleh responden yaitu barang elektronik, konveksi, sembako, daging sapi, daging ayam, ikan basah/kering, sayuran, buah-buahan dan lain-lainnya.

Kuesioner dalam penelitian ini adalah jenis kuestioner terbuka yaitu menanyakan tidak hanya pembayaran retribusi yang dikenakan kepada setiap pedagang tapi juga : (i) jenis barang yang didagangkan; (ii) tempat berdagang; (iii) posisi Letak Tata Usaha (LTU); (iv) luas tempat dagangan; (v) alasan berdagang di Pasar Tanjung; (vi) saran terhadap pungutan dan fasilitas pasar serta pengelolaan pasar. Beberapa pertanyaan tersebut diajukan dalam rangka mengetahui informasi secara langsung dari sudut pandang pedagang tentang pengelolaan potensi pasar di Pasar Tanjung Kabupaten Jember yang di bawah pengelolaan Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung.Menganalisis potensi retribusi pasar di Pasar Tanjung di Kabupaten Jember di tahun 2014.

Mahmudi (2010:73) dalam bukunya Manajemen Keuangan Daerah menjelaskan untuk menghitung Potensi Retribusi Pasar terdapat 7 indikator yaitu :

- a. Fasilitas pasar
- b. Jenis dagangan
- c. Jumlah petugas pemungut
- d. Tarif retribusi
- e. Jumlah kios dan los
- f. Luas pasar dan area kaki lima
- g. Data penerimaan retribusi tahunan

4.3 Gambaran Pasar dan Pedagang Pasar Tanjung Menurut Hasil Penelitian

4.3.1 Fasilitas Pasar

Fasilitas pasar adalah segala kebutuhan yang dapat mempermudah dan memperlancar pelaksanaan aktivitas-aktivitas kegiatan yang ada di Pasar Tanjung Kabupaten Jember. Fasilitas yang terdapat di Pasar Tanjung menurut pihak Dinas Unit Pasar Tanjung sudah lengkap dan terpenuhi. Para pedagang yang membayar retribusi diberikan hak untuk memanfaatkan dan menggunakan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya adalah toilet, musholah, kotak P3k, dan bahkan alat pemadam kebakaran pun tersedia. Pasar Tanjung menyediakan fasilitas yang dibutuhkan pedagang seperti musholah yang terdapat di lantai 2, MCK/ toilet, dan lahan parkir yang ada dibagian barat, timur dan utara Pasar Tanjung. Namun fasilitas seperti toilet dan beberapa lokasi tempat parkir dikelola oleh pihak swasta, seperti toilet dan beberapa tempat parkir yang ada di sebelah selatan Pasar Tanjung Kabupaten Jember.

Hasil penelitian yang diperoleh penyebaran kuisioner yang diisi oleh sampel pedagang menyatakan bahwa pihak pengelola pasar yaitu Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung kurang begitu peduli untuk membenahi fasilitas-fasilitas yang rusak dan tidak layak. Beberapa keluhan para pedagang yang mengeluhkan perbaikan atau perawatan terhadap bangunan pasar yang sudah rusak dan tidak layak, seperti di musim penghujan ini banyak atap di bangunan lantai atas yang bocor sehingga air hujan dapat masuk dan mengganggu proses kegiatan jual-beli yang ada di Pasar Tanjung, kemudian kabel-kabel listrik yang perlu diganti karena kabel sudah tidak layak, dan tingkat kebersihan yang cenderung kurang diperhatikan sehingga jalanan menuju Pasar Tanjung tercium bau yang kurang sedap akibat sampah yang menumpuk dan kurang mendapat penanganan.

4.3.2 Jenis dan Tempat Dagangan

Jenis dagangan yang diperdagangkan di Pasar Tanjung sangat bervariasi, karena Pasar Tanjung adalah pasar terbesar di Kabupaten Jember. Pedagang dari jenis dagangan apa saja dijual di Pasar Tanjung, mulai dari pedagang konveksi, perancangan, perhiasan, kopras, sayuran, buah-buahan, daging, ikan, hingga tukang sate dan bakso juga ada. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan bermacam-macam jenis dagangan yang diperdagangkan di Pasar Tanjung yang diperoleh dari responden sampel penelitian.

Tabel 4.2 Jumlah responden sampel menurut tempat berdagang dan jenis barang yang diperdagangkan

No.	Jenis Barang Dagangan	Jumlah Responden
1	Perhiasan/ Emas	5
2	Konveksi	31
3	Pecah Belah	4
4	Sepatu/ Sandal	4
5	Bangunan	2
6	Cat	1
7	Sepeda	1
8	Pracangan	31
9	Tukang Sepuh	1
10	Arloji	4
11	Sosis	3
12	Kitab	1
13	Kaca	1
14	Asesoris	1
15	Kain	1
16	Palen	2
17	Kacamata	1
18	Buah-buahan	6
19	Minyak Wangi	2
20	Alat Listrik	1
21	Jilbab	1
22	Tekstil	2
23	Jamur	2

24	Bawang Merah	1
25	Keramik	1
26	Warung Nasi	2
27	Rampan	1
28	Plastik	1
29	Polowijo	2
30	Daging Sapi	4
31	Daging Babi	1
32	Ikan Kering	7
33	Pindang	1
34	Ikan Basah	5
35	Babat	1
36	Kue	4
37	Telur Ayam	1
38	Mie Basah	1
39	Sayuran	10
40	Bakso	2
41	Krecikan	2
42	Kopi	1
43	Ayam Potong	4
44	Tempe	4
45	Cecek	1
46	Kelapa	4
47	Timun	1
48	Jagung	1
49	Pisang	1
50	Krupuk	1
51	Cao	1
52	Makanan&Minuman	2
53	Bunga	1
54	Nampan	1
55	Empon-empon	1
56	Sate	1
57	Daging Kambing	1
Total Responden		181

Sumber: Hasil penelitian

Dari tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa terdapat 57 macam jenis dagangan yang diperoleh dari 181 pedagang yang merupakan responden/ sampel penelitian ini. Jenis dagangan yang diperjualbelikan di Pasar Tanjung sangat bervariasi dapat dilihat dari banyaknya macam-macam dagangan yang dijual oleh para pedagang. Dari tabel 4.2 diatas diketahui responden paling banyak adalah pedagang peracangan yaitu sebanyak 31 pedagang yang terdiri dari pedagang toko/kios, los ataupun PKL. Perihal alasan mengapa mereka lebih memilih berdagang di Pasar Tanjung 41 persen responden menjawab karena ramai. Pasar Tanjung yang merupakan Pasar tradisional terbesar di Kabupaten Jember dengan kontribusi yang besar terhadap retribusi pasar daerah dan letak Pasar Tanjung yang strategis di pusat kota. Sehingga masyarakat lebih memilih Pasar Tanjung sebagai tempat untuk membeli berbagai macam-macam kebutuhan sehari-hari. Pasar Tanjung yang merupakan pasar tradisional terbesar di Kabupaten Jember memiliki pesaing yaitu pasar modern yang mulai menjamur di Kabupaten Jember. Keberadaan Pasar Tanjung pun yang berdekatan dengan Matahari Departemen Store dan pasar-pasar modern yang lain membuat kondisi Pasar Tanjung mulai kurang diminati oleh masyarakat, karena adanya pasar-pasar modern yang menjual dagangan lebih lengkap, lebih bersih dan higienis. Berikut merupakan tabel yang menyatakan alasan responden berjualan di Pasar Tanjung Kabupaten Jember .

Tabel 4.3 Alasan responden berdagang di Pasar Tanjung

No.	Alasan	Jumlah	Persentase
1	Karena dekat dengan tempat tinggalnya	43	24%
2	Karena Ramai	78	43%
3	Karena Peraturan Pemda	2	1%
4	Karena tidak ada pilihan lain	42	24%
5	Karena niat berdagang	16	8%
Total		181	100%

Sumber: Hasil penelitian

Tabel diatas menyatakan bahwa 43% pedagang memberikan alasan memilih berjualan atau berdagang di Pasar Tanjung karena Pasar Tanjung ramai pembeli, dapat diketahui bahwa Pasar Tanjung merupakan pasar tradisonal terbesar sehingga masyarakat cenderung pergi ke Pasar Tanjung untuk membeli kebutuhannya dan Pasar Tanjung yang menjual lebih banyak dan berinovatif jenis dagangannya dibandingkan dengan pasar tradisional lainnya di Kabupaten Jember. Kemudian dari tabel di atas dapat dilihat alasan berjualan di Pasar Tanjung 24% menyatakan karena dekat dengan tempat tinggal mereka dan ada pula yang menyatakan karena tidak punya pilihan lain.

Hasil penelitian juga menyatakan bahwa adanya keluhan-keluhan yang dihadapi pedagang di lantai atas, ketidakpuasan para pedagang ketika ternyata Pasar Tanjung terutama di lantai atas kurang dikunjungi para pembeli, para pembeli terkadang enggan untuk berbelanja di lantai atas, alasan mereka antara lain lokasi yang kurang bersih dan tidak tertata, dimana juga akses masuk ke dalam pasar lantai atas yang relatif sempit karena adanya PKL dipinggir-pinggir jalan dan penataan lokasi los tertutup dan los terbuka yang kurang rapi dan tertata dengan baik, membuat pembeli enggan untuk membeli barang di lantai atas Pasar Tanjung. Selain itu PKL yang berada di lantai bawah atau di halaman pasar menyebabkan sepinya pembeli untuk berbelanja di lantai atas. Pembeli lebih memilih praktis dan cepat untuk berbelanja di pedagang lesehan walaupun harga yang ditawarkan cenderung lebih mahal dari harga penjual di lantai atas. Hal ini sangat membuat pedagang di lantai atas merasa tidak adil dan terkadang pedagang di lantai atas susah untuk dipungut retribusi oleh petugas pungut Dinas Pasar dikarenakan sepinya pembeli yang berkunjung ke lantai atas, para pedagang meminta ke pihak pengelola untuk mengatasi masalah tersebut.

4.3.3 Jumlah Petugas Pemungut

Petugas pemungut di pasar bertugas untuk memungut atau menarik retribusi kepada para pedagang yang ada di pasar, baik bulanan, mingguan ataupun harian. Besar jumlah petugas pemungut mempengaruhi efisiensi pemungutan retribusi. Petugas pemungut yang ada di Pasar Tanjung berjumlah 10 orang yang sudah menempati wilayah-wilayah yang telah ditetapkan untuk bertugas menarik pungutan retribusi ke para pedagang. Bagian juru pungut harian di Pasar Tanjung dibagi menjadi 4 (empat) shift yaitu kelompok I bekerja mulai pukul 07.00 s/d 14.00 WIB, kelompok II dari pukul 15.00 s/d 17.00 WIB, kelompok III dari pukul 18.00 s/d 20.00 WIB. Dan kelompok IV 02.00 s/d 06.00 WIB.

Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung merupakan suatu lembaga yang mengurus dan mengelolah retribusi Pasar Tanjung yang nantinya penerimaan tersebut akan disetor ke kas daerah untuk biaya pembangunan daerah. Kinerja pegawai dari Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung sudah ada pembagian tugas yang masing-masing petugas sudah memiliki tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan seperti adanya koordinator retribusi bulanan, koordinator harian, koordinator retribusi parkir, petugas pemungut yang masing-masing retribusi memiliki tugas untuk mencatat dan merekap hasil penerimaan retribusi pasar bergantung kepada petugas tersebut. Apabila petugas menjalankan kewajibannya sebagai juru pungut dengan kurang maksimal, maka hasil yang didapat juga tidak banyak dan kemungkinan besar tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hal ini seperti yang terjadi di petugas Pasar Tanjung yang cenderung mengikuti permintaan pedagang dalam pembayaran retribusinya. Petugas juru pungut harian menjelaskan bahwa dia tidak menagih secara memaksa dan apabila pedagang tidak bisa membayar, sikap petugas juru pungut hanya dapat memaklumi dan pergi untuk menemui pedagang yang lainnya, petugas cenderung menuruti permintaan pedagang untuk mau atau tidak membayar retribusi pasar.

Kurangnya kesadaran pedagang untuk membayar retribusi inilah yang juga menjadi kendala dalam pemungutan retribusi di Pasar Tanjung, serta pengawasan terhadap kinerja pegawai cenderung lemah sehingga berdampak bagi petugas kurang tegas dalam menangani masalah yang dihadapi pedagang yang sulit membayar. Perbaikan manajemen terutama pengawasan sangatlah diperlukan Dinas Pasar maupun Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember agar tercapainya target retribusi yang ditetapkan pada masing-masing pasar-pasar daerah. Namun tidak hanya pihak instansi yang memperbaiki dari pihak pedagang pun seharusnya lebih meningkatkan kesadarannya untuk membayar retribusi. Kurangnya kesadaran dalam membayar retribusi ini dari pihak pedagang dikarenakan banyaknya pedagang yang nunggak, fasilitas pasar yang rusak tidak segera dibenahi dan ditanggapi, serta penetapan tarif retribusi belum mengacu pada peraturan yang berlaku sehingga pihak pedagang malas untuk merespon para petugas pungut ketika meminta membayar retribusi pasar.

4.3.4 Tarif Retribusi yang Dibayar Para Pedagang

Retribusi yang harus dibayar oleh para pedagang di Pasar Tanjung Kabupaten Jember berupa retribusi harian, mingguan ataupun bulanan. Pihak Dinas Pasar Kabupaten Jember Bapak Fadjar selaku koordinator bidang penetapan retribusi menyatakan Pasar Tanjung dalam penetapan tarifnya memberlakukan tarif yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 (tanggal 16 Desember 2014, pkl 10.00). Namun dalam hasil observasi peneliti menemukan ketidaksesuaian pernyataan dari pihak Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung Bapak Slamet selaku Koordinator Retribusi bahwa Pasar Tanjung dalam penetapan tarif masih menggunakan dan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006, dimana dalam tabel dibawah ini menjelaskan perbedaan tarif yang telah ditetapkan.

Tabel 4.4 Perbedaan Tarif Retribusi Pasar Tanjung

Letak Tata	Tarif Retribusi Pasar Berdasarkan	Tarif Retribusi Pasar Berdasarkan
------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Usaha	PERDA no. 13 Tahun 2006	PERDA no. 4 Tahun 2011
LTU I	Rp. 250,-	Rp. 400,-
LTU II	Rp. 200,-	Rp. 350,-
LTU III	Rp. 175,-	Rp. 250,-
LTU IV	Rp. 150,-	Rp. 200,-
LTU V	Rp. 1500,-	Rp. 2500,-

Sumber:

- PERDA no.13 tahun 2006 tentang pengelolaan pasar yang dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Jember
- PERDA no.4 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum

Tabel 4.4 menunjukkan adanya kenaikan tarif yang ditetapkan di Perda Nomor 4 Tahun 2011 dari Perda Nomor 13 Tahun 2006 yang digunakan sebelumnya. Menurut Bapak Fadjar selaku bidang penetapan retribusi Dinas Pasar Kabupaten Jember, kenaikan tarif ini diberlakukan karena target yang diminta oleh Pemerintah Daerah juga mengalami kenaikan. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti menanyakan tentang tarif retribusi kepada Dinas Pasar kabupaten Jember bahwa tarif yang diberlakukan untuk seluruh pasar di Kabupaten Jember sudah menggunakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 sejak tahun 2012. Namun nyatanya tidak senada dengan pernyataan oleh Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung yang menyatakan masih menggunakan Perda Nomor 13 Tahun 2006 dalam penetapan tarif retribusi kepada para pedagang. Dalam hal ini pihak Pasar Tanjung juga menjelaskan bahwa mereka tidak dapat langsung menaikkan tarif retribusi kepada para pedagang di Pasar Tanjung, mereka melihat kondisi pedagang terlebih dahulu. Untuk memenuhi dan menutupi kurangnya target yang ditetapkan Dinas Pasar, pengelola Pasar Tanjung memilih membuat tarif baru dengan menaikkan 10% dari tarif yang lama setiap tahunnya kepada pedagang. Namun kenaikan tarif juga selalu diberitahukan kepada pedagang terlebih dahulu dengan memberikan surat pemberitahuan beserta tarif yang baru, contoh surat pemberitahuan terdapat di lampiran. Berikut ini tarif yang diperlakukan di Pasar Tanjung berdasarkan kebijakan pihak Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung kepada para pedagang untuk mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 4.5 Besaran Tarif Retribusi Pasar yang diberlakukan di Pasar Tanjung Kabupaten Jember oleh Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung Tahun 2013-2014

Objek Retribusi/ LTU	Tarif (Rp/m²/hari)
LTU I / Lantai Bawah	261,4
LTU I / Lantai Atas	242
LTU II/ Lantai Bawah	198
LTU II/ Lantai Atas	220
LTU III (Toko/Kios, bedak los tertutup)	175
LTU IV (los terbuka di dalam pasar)	150
LTU V (halaman pasar di dalam area pasar)	1000

Sumber: Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung, data diolah.

Dapat dilihat dari tabel 4.5 diatas merupakan tarif yang dibuat Dinas pasar Unit Pasar Tanjung terhadap para pedagang, tarif yang ada di tabel 4.7 di atas merupakan tarif yang digunakan apabila pedagang membayar retribusi secara bulanan, sehingga besar pungutan adalah dikalikan luas tempat dagangan dikalikan lagi dengan 30 hari, perincian perhitungan terdapat di lampiran penelitian ini. dapat dilihat dari tabel diatas bahwa dalam tarif LTU I dan LTU II diklasifikasikan lagi menurut tempatnya di lantai atas atau di lantai bawah. LTU I dan LTU II yang merupakan pedagang toko/kios cenderung membayar retribusi secara bulanan, sedangkan pedagang bedak/los dan lesehan membayar retribusi secara harian. Retribusi yang dipungut secara harian sangat tidak sesuai dengan tarif dari ketentuan yang berlaku, dari hasil penelitian yang diperoleh dari data kuisioner yang di isi oleh para pedagang, para petugas memungut Rp. 2000,-s/d Rp. 3000,- yang dikenakan pedagang yang berjualan di los/bedak di lantai atas, dan Rp. 1000,- s/d Rp. 5000,- yang dikenakan para pedagang lesehan. Hal ini sangat nampak ketidaksesuaian dan keruwetan dalam penentuan dan penarikan retribusi kepada para pedagang yang dilakukan oleh pihak pengelola pasar. Namun berdasarkan hasil kuisioner juga menyatakan bahwa setengah dari pedagang berpendapat bahwa tarif yang ditetapkan ini, yaitu tarif untuk pungutan retribusi pasar kepada para pedagang sudah cukup wajar.

Tabel 4.6 Penilaian Responden terhadap retribusi yang dibebankan

No.	Penilaian	Jumlah	%
1	Ringan	53	29%
2	Wajar	109	60%
3	Sangat Berat	19	11%
Total		181	100%

Sumber: Hasil Penelitian

Tabel 4.6 menyatakan bahwa mayoritas sebesar 60% pedagang berpendapat bahwa tarif yang dibebankan kepada pedagang sudah cukup wajar. Alasannya karena dalam melaksanakan aktivitas pemungutannya masih memperhatikan kondisi masing-masing tempat letak usaha. Adapun kenaikan tarif akan diberitahukan kepada pedagang terlebih dahulu. Besarnya kenaikan tarif biasanya hanya 10% dari tarif lama. Kenaikan tarif ini adalah usaha Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung yang bertujuan untuk dapat mencapai target penerimaan retribusi yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah. Namun ada pula yang menyatakan bahwa pungutan yang mereka bayarkan nilainya memang sesuai dengan kondisi kios/losnya (luasnya) tetapi tidak sesuai dengan karcis yang diberikan petugas kepada mereka. Dengan memperhatikan hal itu terlihat adanya ketidakkonsistenan dalam pungutan retribusi dan ini cenderung membuka peluang untuk munculnya pungutan retribusi diluar ketentuan yang resmi. Dan juga ditegaskan bahwa tarif retribusi pasar di Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tidak digunakan sebagai acuan penarikan tarif retribusi kepada pedagang di Pasar Tanjung Kabupaten Jember

4.3.5 Jumlah Kios dan Los

Menurut data yang dimiliki Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung bahwa Jumlah Kios dan Los di Pasar Tanjung Kabupaten Jember pada tahun 2014 memiliki jumlah total toko/kios sebesar 1251 toko, jumlah los terbuka sebesar 858 los, dan jumlah pedagang lesehan sebesar 556 petak. Jumlah tersebut merupakan jumlah dari Jumlah

Toko/kios/los/lesehan yang ada di lantai atas dan lantai bawah. Namun dari banyaknya toko/kios yang dimiliki tidak semuanya terisi dan ditempati pedagang.

Tabel 4.7 Jumlah toko/kios yang terisi oleh pedagang di Pasar Tanjung Kabupaten Jember tahun 2014

Toko/kios yang terdapat di Pasar Tanjung	Jumlah toko/kios
Lantai Bawah	531
Lantai Atas	720
Toko/kios yang terisi di Pasar Tanjung	Jumlah toko/kios
Lantai Bawah	524
Lantai Atas	334

Sumber : Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember, data diolah.

Tabel 4.7 diatas menunjukkan jumlah pedagang yang menempati toko/kios yang terdapat di lantai atas dan lantai bawah Pasar Tanjung, terlihat terdapat sisa 7 toko/kios yang belum terisi di lantai bawah dan sisa 386 toko/kios di lantai atas. Pemanfaatan kios dan los yang ada di Pasar Tanjung kurang di atasi dengan baik terlihat dari banyaknya toko dan kios yang kosong.

Penataan pedagang di Pasar Tanjung pedagang ada yang berdagang di lantai bawah dan ada pula yang berdagang di lantai atas, lantai bawah dibagi menjadi 8 blok, yaitu Blok A-H dan lantai atas dibagi menjadi 6 blok, yaitu Blok A-F. Ada pula pedagang yang berjualan bukan di toko/kios ataupun los melainkan di luar/ di pekarangan pasar. Pedagang ini oleh pengelola pasar dikategorikan sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL). Peneliti telah membagi dan mengklasifikasikan pedagang berdasarkan Letak Tata Usahanya yang terdiri dari pedagang di LTU I sebanyak 104 pedagang, LTU II sebanyak 773 pedagang, LTU III sebanyak 154 pedagang, LTU IV sebanyak 220 pedagang, LTU V sebanyak 556 pedagang, berikut merupakan tabel jumlah dan komposisi sampel terhadap para pedagang tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8 Jumlah sampel pedagang di Pasar Tanjung

No	Letak Tata Usaha (LTU)	Luas (m²)	Jumlah (pedagang)
1	LTU I	6	3

		12	2
		16	3
		20	2
2	LTU II	3	5
		4	9
		6	22
		12	24
		14	1
		16	9
		18	1
		20	4
		22.5	1
		56	1
3	LTU III	2	1
		3	1
		3.75	1
		4	3
		4.5	1
		5.5	2
		6	3
		6.25	1
		6.8	1
		7.5	2
4	LTU IV	2	1
		3	5
		4	5
		5	3
		6	8
5	LTU V	1.5	36
		2	20
Total Pedagang			181

Sumber: Hasil Penelitian

Dari tabel 4.8 diatas menyatakan bahwa sebagian besar pedagang 43% pedagang menempati LTU II atau toko/kios yang menghadap ke dalam yang terdapat di lantai bawah dan di lantai atas Pasar Tanjung. Dan selanjutnya 31% pedagang yang menempati LTU V, pedagang lebih memilih menjadi pedagang lesehan/ PKL yang cenderung berjualan di lantai bawah, menurut mereka pembeli lebih menjangkau dan tempatnya lebih strategis sehingga pembeli lebih mudah untuk menemukan mereka. Kemudian 12% pedagang yang menempati LTU IV dan 9% pedagang yang menempati LTU III, serta sisanya 5% pedagang yang menempati LTU I.

Ada beberapa toko/kios dan los di lantai atas dan bawah yang tidak diisi oleh pedagang. Hal ini dapat dikarenakan akibat adanya pedagang lesehan/ PKL yang berjualan di luar pasar sehingga pedagang yang ada di dalam pasar terutama pedagang di lantai atas kurang dikunjungi pembeli. Pihak pengelola pasar sudah memberikan kebijakan untuk mengatasi permasalahan ini, yaitu para PKL yang berada di sebelah timur Pasar Tanjung memulai berdagang mulai jam 6 sore hingga 6 pagi. Sehingga tidak akan lagi pedagang yang ada di lantai atas Pasar Tanjung merasa tersaingi terhadap keberadaan para PKL yang sebelumnya sudah buka mulai pagi hari. Permasalahan PKL disebabkan ketidaktegasan pengelolaan pedagang kaki lima menyebabkan pedagang kaki lima melakukan kegiatan usahanya tanpa memperhatikan ketersediaan tata ruang yang ada, seperti PKL yang ada di jalanan tangga menuju ke lantai atas. Para PKL ini juga berada di bagian luar pasar sehingga menutupi atau menghalangi jalan ke bagian dalam pasar. Hal ini merupakan salah satu alasan berkurangnya minat pembeli untuk berbelanja di pasar tradisional dan lebih memilih berbelanja di pasar modern seperti supermarket.

4.3.6 Luas Pasar dan Area Kaki Lima

Luas pasar dan area kaki lima berpengaruh terhadap jumlah pedagang yang ada di pasar. Semakin luas area yang ada dipasar semakin besar pula daya tampung pedagang yang ada. Ini menjadikan kapasitas pedagang yang menempati pasar semakin banyak dan bervariasi. Luas Pasar di Pasar Tanjung Kabupaten Jember seluruhnya adalah 25.105 m².

Area pedagang kaki lima yang paling menonjol adalah pedagang kaki lima di sebelah timur Pasar Tanjung, PKL yang sudah ditertibkan di bulan Oktober kemarin dengan melakukan pembersihan PKL yang berada di area tersebut untuk segera pindah ke dalam pasar. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan yang terjadi di jalanan area Pasar Tanjung. Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung memberikan pilihan kepada PKL untuk buka mulai jam 6 sore hingga 6 pagi atau pindah ke dalam pasar.

Kebijakan tersebut sekarang sudah diterapkan dan hasilnya jalanan di sekitar sebelah timur dan selatan Pasar Tanjung terlihat luas dan bersih tanpa PKL. Dan tempat tersebut dialih fungsikan sebagai tempat parkir mobil, sehingga kendaraan mobil tidak lagi parkir secara berjejer di sepanjang jalan menuju keluar masuk pasar. Dan kemacetan yang sebelumnya terjadi di jam sibuk pasar yaitu pukul 17.00-19.00 WIB pun sedikit mulai berkurang dan teratasi.

4.3.7 Data Penerimaan Retribusi Tahunan

Penerimaan retribusi pasar terutama di Pasar Tanjung Kabupaten Jember di tahun belakangan menunjukkan penurunan, yang sudah di jelaskan peneliti di latar belakang penelitian ini. Retribusi pasar merupakan salah satu sumber penerimaan yang berpengaruh besar terhadap retribusi daerah. Terutama retribusi pasar di Pasar Tanjung, yang termasuk pasar golongan kelas utama di Kabupaten Jember. Berikut gambaran mengenai kontribusi penerimaan retribusi Pasar Tanjung terhadap retribusi Pasar Daerah tahun 2009 s/d 2013.

Tabel 4.9 Kontribusi retribusi Pasar Tanjung terhadap Retribusi Pasar Daerah di Kabupaten Jember ditahun 2008-2013

Tahun	Retribusi Pasar Daerah (Rp)	Retribusi Pasar Tanjung (Rp)	Besar Kontribusi (%)
2008	3.599.350.400,-	895.031.100,-	24,87
2009	3.817.123.650,-	935.695.400,-	24,51
2010	4.192.868.150,-	1.034.598.450,-	24,67
2011	4.568.537.540,-	1.138.411.540,-	24,92
2012	4.618.586.960,-	1.221.969.360,-	26,46
2013	4.589.665.000,-	1.170.805.000,-	25,51

Sumber : Dinas Pasar Kabupaten Jember Tahun 2008-2013, data diolah.

Grafik 4.1 Kontribusi retribusi pasar Tanjung terhadap retribusi pasar daerah

Dari grafik 4.1 dan tabel 4.9 diatas menunjukkan bahwa kontribusi Pasar Tanjung terhadap retribusi pasar daerah kurun waktu lima tahun terahir ini mengalami fluktuasi, dimana mengalami penurunan di tahun 2009 yaitu kontribusi

hanya 24,51% dan meningkat sedikit demi sedikit hingga pada puncak tertinggi di tahun 2012 yaitu berkontribusi sebesar 26,46% dan kembali turun di tahun 2013 hanya berkontribusi 25,51%. Berikut ini tabel yang menunjukkan data sekunder mengenai penerimaan retribusi pasar di Pasar Tanjung tahun 2009 s/d 2013.

Tabel 4.10 Rekapitulasi target dan realisasi Retribusi Pasar di Pasar Tanjung Kabupaten Jember Tahun 2009 s.d 2013

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2009	983.893.000,-	935.695.400,-	95,10
2010	1.033.100.000,-	1.034.598.450,-	100,14
2011	1.136.410.000,-	1.138.411.540,-	100,18
2012	1.221.641.000,-	1.221.969.360,-	100,03
2013	1.170.805.000,-	1.032.607.340,-	88,19

Sumber : Dinas Pasar Kabupaten Jember tahun 2009 s.d 2013, data diolah

Tabel 4.10 diatas menunjukkan bahwa memang di tahun 2013 mengalami penurunan dan hasil realisasi penerimaan retribusi pasar tidak menembus target yang ditetapkan. Hal ini menggelitik peneliti untuk mengitung potensi yang ada di Pasar Tanjung di tahun 2014 melalui data-data sekunder yang terkumpul sebagai referensi. Berikut ini perhitungan potensi retribusi Pasar Tanjung Kabupaten Jember di tahun 2014 dari bulan Januari s/d Desember.

4.4 Hasil Perhitungan Potensi Retribusi Pasar Tanjung

Hasil perhitungan ini diperoleh dari penelitian yang dilakukan peneliti pada lokasi penelitian yang bertujuan untuk menjawab permasalahan yang ada di dalam penelitian ini. Dari hasil observasi dan data-data sekunder yang diperoleh peneliti dari Dinas Unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember yang dijadikan sebagai pedoman informasi mengenai penelitian ini. Selain data-data tersebut data dalam penelitian ini juga berasal dari dokumen-dokumen yang berupa Peraturanabn Daerah dan penyebaran angket.

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Jember. Besarnya retribusi daerah sangat berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga retribusi daerah dapat meningkatkan pendapatannya atau paling tidak meningkat dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu perlunya pengelolaan potensi penerimaan retribusi pasar secara maksimal.

Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh di tangan. Potensi bersifat tersembunyi, sehingga perlu diteliti besarnya kemampuan yang ada, termasuk potensi pendapatan. Dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan merupakan bagian dari salah satu upaya mengenali potensi (Mahmudi, 2010:48). Potensi yang dihitung adalah potensi retribusi pasar tahun 2014. Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar potensi yang ada dan realisasi penerimaan Pasar Tanjung yang tergolong sebagai pasar utama di Kabupaten Jember dengan menggunakan perhitungan rumus dasar perhitungan potensi retribusi pasar umum selama setahun menurut Mahmudi (2010:73).

$$\text{Potensi} = [(\text{Jml. Kios} \times \text{TR}) + (\text{Jml. Los} \times \text{TR}) + (\text{Jml. K5} \times \text{TR})] \times [\sum \text{Aktivitas Pasar Sebulan} \times 12]$$

Keterangan :

Jml. Kios = jumlah kios

Jml. Los = jumlah los

Jml. K5 = jumlah pedagang kaki lima

TR = tarif retribusi

Penetapan tarif retribusi pasar di pasar tradisional yang diatur berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum yang di dalam lampiran VII menjelaskan penetapan tarif pasar tradisional yang semula peraturan yang mengatur tarif pungutan ini adalah Peraturan Daerah Nomor

13 tahun 2006 tentang pengelolaan pasar yang dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Jember. Berikut ini adalah besarnya tarif yang ditetapkan oleh pihak pengelola Pasar Tanjung Kabupaten Jember.

Tabel 4.11 Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Jember diPeraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 Kabupaten Jember

Objek Retribusi/ Letak Tata Usaha (LTU)	Tarif (Rp/m ² /hari)
Pasar Kelas Utama	
LTU I	250
LTU II	200
LTU III	175
LTU IV	150
LTU V	1500
Pasar Kelas I	
LTU I	200
LTU II	175
LTU III	150
LTU IV	125
LTU V	1250
Pasar Kelas II	
LTU I	175
LTU II	150
LTU III	125
LTU IV	100
LTU V	1000
Pasar Kelas III	
LTU I	150
LTU II	125
LTU III	100
LTU IV	75
LTU V	500

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011, Lampiran VII, data diolah.

Keterangan:

1. LTU 1 yakni toko atau kios yang menghadap keluar
2. LTU 2 yakni toko atau kios yang menghadap kedalam
3. LTU 3 yakni toko atau kios, bedak los tertutup
4. LTU 4 yakni los terbuka di dalam pasar, dan
5. LTU 5 yakni halaman pasar di dalam atau di luar area sekitar pasar

Untuk tarif pungutan retribusi dapat dilihat berbeda sesuai dengan golongan kelas pasar. Tarif terlihat bersifat progresif, artinya semakin baik kelas pasar maka semakin tinggi tarifnya. Pemungutan sewa maupun pelayanan dihitung berdasarkan (m^2). Tarif pungutan retribusi diatas dilakukan secara tunai setiap harinya oleh petugas yang ditunjuk dengan menggunakan tanda bukti berupa karcis (atau tanda bukti yang sah). Artinya penagihan dilakukan hanya kepada para pedagang yang benar-benar berdagang pada hari itu dan menggunakan fasilitas jasa di area pasar.

Diketahui bahwa jumlah dan luas yang ada di Pasar Tanjung berbeda-beda, dari hasil penelitian yang didapat di dalam dokumen Unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember. Jumlah total pedagang yang terdapat di Pasar Tanjung adalah 1807 pedagang, dengan rincian pedagang di LTU I sebanyak 104 pedagang, LTU II sebanyak 773 pedagang, LTU III sebanyak 154 pedagang, LTU IV sebanyak 220 pedagang, LTU V sebanyak 556 pedagang, yang merupakan jumlah dari LTU yang ada di lantai atas dan di lantai bawah. Adapun rincian jumlah dan luas sebagai berikut:

Tabel 4.12 Daftar jumlah dan luas Letak Tata Usaha (LTU) di Pasar Tanjung.

Jenis Letak Tempat Usaha (LTU)	Luas (m2)	Jumlah (Pedagang)
a. LTU I (toko/kios yang menghadap ke luar)	6	32
	12	22
	16	36
	20	14
b. LTU II (toko/kios yang menghadap ke dalam)	3	55
	4	92
	6	221
	12	269
	14	1
	16	91
	18	4
	20	38
22,5	1	

	56	1
c. LTU III (toko/kios, bedak los tertutup)	2	11
	3	8
	3,75	4
	4	40
	4,5	1
	5,5	15
	6	62
	6,25	1
	6,8	1
	7,5	11
d. LTU IV (los terbuka di dalam pasar)	2	13
	3	55
	4	51
	5	24
	6	77
e. LTU V (halaman pasar di dalam area pasar)	1,5	359
	2	197
Jumlah		1807

Sumber: Unit Pasar Tanjung Kab. Jember, 2014, data diolah.

Dengan perhitungan potensi menggunakan rumus Mahmudi

$$\text{Potensi} = [(\text{Jml. Kios} \times \text{TR}) + (\text{Jml. Los} \times \text{TR}) + (\text{Jml. K5} \times \text{TR})] \times [\sum \text{Aktivitas Pasar Sebulan} \times 12]$$

Kemudian rumus tersebut diimplikasikan ke dalam perhitungan potensi retribusi Pasar Tanjung di tahun 2014, perhitungan potensi dengan membandingkan hasil pemerolehan potensi berdasarkan tarif yang dikenakan Perda Nomor 4 Tahun 2011 dengan Perda Nomor 13 Tahun 2006. Dan diperoleh perhitungan sebagai berikut:

Tabel 4.13 Perhitungan Potensi Retribusi Pasar Tanjung Tahun 2014 dengan Tarif Retribusi berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2006

JenisLetak Tempat Usaha	Jumlah (Pedagang)	Perhitungan	
a. LTU I tarif Rp 400/m2/hari dengan jumlah 104 toko/kios			
Ukuran 6 m2	32	6 x 32 x Rp. 250,- x 30 hari x 12	= Rp. 17.280.000,-
Ukuran 12 m2	22	12 x 22 x Rp. 250,- x 30 hari x 12	= Rp. 23.760.000,-
Ukuran 16 m2	36	16 x 36 x Rp. 250,- x 30 hari x 12	= Rp. 51.840.000,-
Ukuran 20 m2	14	20 x 14 x Rp. 250,- x 30 hari x 12	= Rp. 25.200.000,-
b. LTU II tarif Rp 300/m2/hari dengan jumlah 773 toko/kios			
Ukuran 3 m2	55	3 x 55 x Rp. 200,- x 30 hari x 12	= Rp. 11.880.000,-
Ukuran 4 m2	92	4 x 92 x Rp. 200,- x 30 hari x 12	= Rp. 39.744.000,-
Ukuran 6 m2	221	6 x 221 x Rp. 200,- x 30 hari x 12	= Rp. 95.472.000,-
Ukuran 12 m2	269	12 x 269 x Rp. 200,- x 30 hari x 12	= Rp. 232.416.000,-
Ukuran 14 m2	1	14 x 1 x Rp. 200,- x 30 hari x 12	= Rp. 1.008.000,-
Ukuran 16 m2	91	16 x 91 x Rp. 200,- x 30 hari x 12	= Rp. 104.832.000,-
Ukuran 18 m2	4	18 x 4 x Rp. 200,- x 30 hari x 12	= Rp. 5.184.000,-
Ukuran 20 m2	38	20 x 38 x Rp. 200,- x 30 hari x 12	= Rp. 54.720.000,-
Ukuran 22,5 m2	1	22,5 x 1 x Rp. 200,- x 30 hari x 12	= Rp. 1.620.000,-
Ukuran 56 m2	1	56 x 1 x Rp. 200,- x 30 hari x 12	= Rp. 4.032.000,-
c. LTU III tarif Rp 250/m2/hari dengan jumlah 154 bedak/los			
Ukuran 2 m2	11	2 x 11 x Rp. 175,- x 30 hari x 12	= Rp. 1.386.000,-
Ukuran 3 m2	8	3 x 8 x Rp. 175,- x 30 hari x 12	= Rp. 1.512.000,-
Ukuran 3,75 m2	4	3,75 x 4 x Rp. 175,- x 30 hari x 12	= Rp. 945.000,-
Ukuran 4 m2	40	4 x 40 x Rp. 175,- x 30 hari x 12	= Rp. 10.080.000,-
Ukuran 4,5 m2	1	4,5 x 1 x Rp.175,- x 30 hari x 12	= Rp. 283.500,-
Ukuran 5,5 m2	15	5,5 x 15 x Rp. 175,- x 30 hari x 12	= Rp. 5.197.500,-
Ukuran 6 m2	62	6 x 62 x Rp. 175,- x 30 hari x 12	= Rp. 23.436.000,-
Ukuran 6,25 m2	1	6,25 x 1 x Rp. 175,- x 30 hari x 12	= Rp. 393.750,-
Ukuran 6,8 m2	1	6,8 x 1 x Rp. 175,- x 30 hari x 12	= Rp. 428.400,-
Ukuran 7,5 m2	11	7,5 x 11 x Rp. 175,- x 30 hari x 12	= Rp. 5.197.500,-
d. LTU IV tarif Rp 200/m2/hari dengan jumlah 220 los terbuka			
Ukuran 2 m2	13	2 x 13 x Rp. 150,- x 30 hari x 12	= Rp. 1.404.000
Ukuran 3 m2	55	3 x 55 x Rp. 150,- x 30 hari x 12	= Rp. 8.910.000
Ukuran 4 m2	51	4 x 51 x Rp. 150,- x 30 hari x 12	= Rp. 11.016.000
Ukuran 5 m2	24	5 x 24 x Rp. 150,- x 30 hari x 12	= Rp. 6.480.000
Ukuran 6 m2	77	6 x 77 x Rp. 150,- x 30 hari x 12	= Rp. 24.948.000
e. LTU V tarif Rp 2500/m2/hari dengan jumlah 556 pedagang			
Ukuran 1,5 m2	359	1,5 x 359x Rp. 1500,-x 30 hari x 12	= Rp. 290.790.000
Ukuran 2 m2	197	2 x 197 x Rp. 1500,- x 30 hari x 12	= Rp. 212.760.000
Jumlah	1807	Rp. 1.274.155.650	

Tabel 4.14 Perhitungan Potensi Retribusi Pasar Tanjung Tahun 2014 dengan Tarif Retribusi berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2011

Jenis Letak Tempat Usaha	Jumlah (Pedagang)	Perhitungan	
a. LTU I tarif Rp 400/m²/hari dengan jumlah 104 toko/kios			
Ukuran 6 m ²	32	6 x 32 x Rp. 400,- x 30 hari x 12	= Rp. 27.648.000,-
Ukuran 12 m ²	22	12 x 22 x Rp. 400,- x 30 hari x 12	= Rp. 38.016.000,-
Ukuran 16 m ²	36	16 x 36 x Rp. 400,- x 30 hari x 12	= Rp. 82.944.000,-
Ukuran 20 m ²	14	20 x 14 x Rp. 400,- x 30 hari x 12	= Rp. 40.320.000,-
b. LTU II tarif Rp 300/m²/hari dengan jumlah 773 toko/kios			
Ukuran 3 m ²	55	3 x 55 x Rp. 300,- x 30 hari x 12	= Rp. 17.820.000,-
Ukuran 4 m ²	92	4 x 92 x Rp. 300,- x 30 hari x 12	= Rp. 39.744.000,-
Ukuran 6 m ²	221	6 x 221 x Rp. 300,- x 30 hari x 12	= Rp. 143.208.000,-
Ukuran 12 m ²	269	12 x 269 x Rp. 300,- x 30 hari x 12	= Rp. 348.624.000,-
Ukuran 14 m ²	1	14 x 1 x Rp. 300,- x 30 hari x 12	= Rp. 1.512.000,-
Ukuran 16 m ²	91	16 x 91 x Rp. 300,- x 30 hari x 12	= Rp. 157.248.000,-
Ukuran 18 m ²	4	18 x 4 x Rp. 300,- x 30 hari x 12	= Rp. 7.776.000,-
Ukuran 20 m ²	38	20 x 38 x Rp. 300,- x 30 hari x 12	= Rp. 82.080.000,-
Ukuran 22,5 m ²	1	22,5 x 1 x Rp. 300,- x 30 hari x 12	= Rp. 2.430.000,-
Ukuran 56 m ²	1	56 x 1 x Rp. 300,- x 30 hari x 12	= Rp. 6.048.000,-
c. LTU III tarif Rp 250/m²/hari dengan jumlah 154 bedak/los			
Ukuran 2 m ²	11	2 x 11 x Rp. 250,- x 30 hari x 12	= Rp. 1.980.000,-
Ukuran 3 m ²	8	3 x 8 x Rp. 250,- x 30 hari x 12	= Rp. 2.160.000,-
Ukuran 3,75 m ²	4	3,75 x 4 x Rp. 250,- x 30 hari x 12	= Rp. 1.350.000,-
Ukuran 4 m ²	40	4 x 40 x Rp. 250,- x 30 hari x 12	= Rp. 14.400.000,-
Ukuran 4,5 m ²	1	4,5 x 1 x Rp. 250,- x 30 hari x 12	= Rp. 405.000,-
Ukuran 5,5 m ²	15	5,5 x 15 x Rp. 250,- x 30 hari x 12	= Rp. 7.425.000,-
Ukuran 6 m ²	62	6 x 62 x Rp. 250,- x 30 hari x 12	= Rp. 33.480.000,-
Ukuran 6,25 m ²	1	6,25 x 1 x Rp. 250,- x 30 hari x 12	= Rp. 562.500,-
Ukuran 6,8 m ²	1	6,8 x 1 x Rp. 250,- x 30 hari x 12	= Rp. 612.000,-
Ukuran 7,5 m ²	11	7,5 x 11 x Rp. 250,- x 30 hari x 12	= Rp. 7.425.000,-
d. LTU IV tarif Rp 200/m²/hari dengan jumlah 220 los terbuka			
Ukuran 2 m ²	13	2 x 13 x Rp. 200,- x 30 hari x 12	= Rp. 1.872.000
Ukuran 3 m ²	55	3 x 55 x Rp. 200,- x 30 hari x 12	= Rp. 11.880.000
Ukuran 4 m ²	51	4 x 51 x Rp. 200,- x 30 hari x 12	= Rp. 14.688.000
Ukuran 5 m ²	24	5 x 24 x Rp. 200,- x 30 hari x 12	= Rp. 8.640.000
Ukuran 6 m ²	77	6 x 77 x Rp. 200,- x 30 hari x 12	= Rp. 33.264.000
e. LTU V tarif Rp 2500/m²/hari dengan jumlah 556 pedagang			
Ukuran 1,5 m ²	359	1,5 x 359 x Rp. 2500,- x 30 hari x 12	= Rp. 484.650.000
Ukuran 2 m ²	197	2 x 197 x Rp. 2500,- x 30 hari x 12	= Rp. 354.600.000
Jumlah	1807	Rp. 1.974.811.500	

Tabel 4.13 dan tabel 4.14 diatas menunjukkan perhitungan potensi penerimaan retribusi Pasar Tanjung di tahun 2014, berdasarkan tarif menurut Perda Nomor 13 Tahun 2006 yaitu sebesar Rp. 1.274.155.650,- dan hasil perhitungan potensi penerimaan retribusi berdasarkan tarif menurut Perda Nomor 4 Tahun 2011 sebesar Rp. 1.974.511.500,-. Besar potensi penerimaan yang hilang di Pasar Tanjung tahun 2014 dapat dihitung dengan mencari selisih dari perhitungan potensi penerimaan retribusi berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2011 dengan Perda Nomor 13 Tahun 2006 sebagai berikut:

- Besar Potensi Pasar Tanjung : Rp. 1.974.511.500 - Rp. 1.274.155.650
= Rp. 700.355.850,-

Perhitungan selisih diatas adalah besar potensi yang ada di Pasar Tanjung di tahun 2014, yaitu sebesar Rp. 700.355.850,-. Apabila pasar Tanjung mampu menggunakan patokan tarif yang ada di dalam Perda Nomor 4 Tahun 2011 maka Pasar Tanjung akan mampu menerima penerimaan retribusi pasar yang lebih besar dan dapat mencapai target yang ditentukan oleh Dinas Pasar. Berikut ini merupakan hasil realisasi penerimaan retribusi pasar yang diambil dari data Dinas Pasar Kabupaten Jember di tahun 2014.

Tabel 4.15 Realisasi penerimaan retribusipasar di Pasar Tanjung tahun 2014

No	Bulan	Realisasi (Rp)
1	Januari	71.345.550,-
2	Februari	91.250.300,-
3	Maret	84.274.600,-
4	April	94.754.610,-
5	Mei	86.472.160,-
6	Juni	89.473.700,-
7	Juli	84.016.160,-
8	Agustus	73.446.520,-

9	September	66.380.980,-
10	Oktober	76.306.730,-
11	November	85.166.010,-
12	Desember	93.906.270,-
Total		996.793.590,-

Sumber: Dinas Pasar Kabupaten Jember, 2014, data diolah.

Tabel 4.14 menunjukkan data Realisasi penerimaan retribusi Pasar Tanjung 2014 dari bulan Januari s/d Desember sebesar Rp. 996.793.590,-. Sehingga perhitungan persentase penerimaan retribusi pasar di Pasar Tanjung tahun 2014 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi (\%)} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Potensi}} \times 100 \% \\
 &= \frac{\text{Rp } 996.793.590,-}{\text{Rp. } 1.274.155.650,-} \times 100 \% \\
 &= 78,23 \%
 \end{aligned}$$

Hasil diatas merupakan perhitungan persentase realisasi terhadap potensi retribusi Pasar Tanjung tahun 2014 berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2011 yang berlaku, menunjukkan hasil baik yaitu 78,23 % atau lebih dari 50% (>50%). Perhitungan diatas merupakan perhitungan normatif yang artinya perhitungan yang berdasar kepada peraturan yang berlaku, peraturan yang berlaku tersebut adalah Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 dikarena Pasar Tanjung masih memberlakukan tarif tersebut sebagai acuan tarif penarikan retribusinya.

Peneliti mengambil sampel 181 pedagang yang diperoleh dari 10% jumlah populasi dan memberikan lembaran kuisioner yang berisikan pertanyaan tentang besaran pungutan yang ditarik oleh petugas setiap bulan atau setiap harinya. Berikut perhitungan potensi yang peneliti peroleh dari data lembaran-lembaran kuisioner yang dibagikan kepada para pedagang.

Tabel 4.16 Perhitungan potensi penerimaan retribusi dari responden di Pasar Tanjung

Pedagang	Lokasi Kios/Los/Lesehan	Jenis Dagangan	Kios/Los	PKL/Lesehan	hari	Jumlah Pungutan
				Rp		Rp
1	LTU I / 6m / Siti Umamik	Emas	47000		1	47000
2	LTU I / 6m/ Siti Sa'adah	Konveksi	47000		1	47000
3	LTU I / 6m/ Eko Budi	Pecah Belah	47000		1	47000
4	LTU I / 12m/ Sri Astuti	Sepatu/ Sandal	47000		1	47000
5	LTU I / 12m/ Abdul Rokhim	Konveksi	47000		1	47000
6	LTU I / 16m/ Agus Supianto	Perhiasan	125500		1	125500
7	LTU I / 16m/ Dewi Yuliani	Bangunan	125500		1	125500
8	LTU I / 16m/ Adi Wibowo	Konveksi	125500		1	125500
9	LTU I / 20m/ Handik C.	Cat	157000		1	157000
10	LTU I / 20m/ Fredy	Sepeda	157000		1	157000
11	LTU II/ 3m/ Slamet Solihin	Pracangan	22000		1	22000
12	LTU II/ 3m/ Lilik Masliha	Pracangan	22000		1	22000
13	LTU II/ 3m/ Hj. Maimunah	Pracangan	22000		1	22000
14	LTU II/ 3m/ Fatkhuliyah	Pracangan	22000		1	22000
15	LTU II/ 3m/ Abd Hamid	Tukang Sepuh	24000		1	24000
16	LTU II/ 4m/ Matnur	Pracangan	26500		1	26500
17	LTU II/ 4m/ Suyitno	Pracangan	26500		1	26500
18	LTU II/ 4m/ Linawati	Konveksi	24000		1	24000
19	LTU II/ 4m/ Tukiman	Konveksi	24000		1	24000
20	LTU II/ 4m/ Abdus Samad	Arloji	24000		1	24000
21	LTU II/ 4m/ Sumiati	Sosis	24000		1	24000
22	LTU II/ 4m/ Hartantik	Pracangan	24000		1	24000
23	LTU II/ 4m/ Siti Chotijah	Pracangan	24000		1	24000
24	LTU II/ 4m/ Fatmi	Pracangan	24000		1	24000
25	LTU II/ 6m/ Watsiqo	Konveksi	36000		1	36000
26	LTU II/ 6m/ Mulyadi	Konveksi	36000		1	36000
27	LTU II/ 6m/ Lulu Susanti	Konveksi	36000		1	36000
28	LTU II/ 6m/ H Subhan Abdul	Pecah Belah	36000		1	36000
29	LTU II/ 6m/ Suharnati	Konveksi	36000		1	36000
30	LTU II/ 6m/ Suharwati	Konveksi	36000		1	36000
31	LTU II/ 6m/ Saleh Salim	Kitab	36000		1	36000
32	LTU II/ 6m/ Muhammad	Konveksi	36000		1	36000
33	LTU II/ 6m/ Munawaroh	Konveksi	36000		1	36000
34	LTU II/ 6m/ Samsul Baso'er	Konveksi	36000		1	36000
35	LTU II/ 6m/ Muntaha	Pracangan	36000		1	36000
36	LTU II/ 6m/ Nur Sudjak	Pracangan	40000		1	40000
37	LTU II/ 6m/ Ibnu Dahnan	Pracangan	40000		1	40000
38	LTU II/ 6m/ Umi Zaenab	Pracangan	36000		1	36000

39	LTU II/ 6m/ Syah Roni P.	Pracangan	36000	1	36000
40	LTU II/ 6m/ P. Nur	Pracangan	36000	1	36000
41	LTU II/ 6m/ Saginten	Pracangan	36000	1	36000
42	LTU II/ 6m/ Bu Sumi	Pracangan	36000	1	36000
43	LTU II/ 6m/ H. Ach. Taufik	Pracangan	36000	1	36000
44	LTU II/ 6m/ Sri Utami	Pracangan	36000	1	36000
45	LTU II/ 6m/ Masfufah	Pracangan	36000	1	36000
46	LTU II/ 6m/ Ariyati Aminah	Pracangan	36000	1	36000
47	LTU II/ 12m/ Edi Nu'is P	Konveksi	71500	1	71500
48	LTU II/ 12m/ Indrawati	Bangunan	71500	1	71500
49	LTU II/ 12m/ Henky G.	Kaca	71500	1	71500
50	LTU II/ 12m/ Teguh G.	Asesoris	71500	1	71500
51	LTU II/ 12m/ Sukristin	Konveksi	71500	1	71500
52	LTU II/ 12m/ Sylviskumala	Palen	71500	1	71500
53	LTU II/ 12m/ Sunyoto	Konveksi	71500	1	71500
54	LTU II/ 12m/ Ilham Ahmadi	Kain	71500	1	71500
55	LTU II/ 12m/ Lydyawati	Konveksi	71500	1	71500
56	LTU II/ 12m/Any Ramayati	Palen	71500	1	71500
57	LTU II/ 12m/ Fatur Rohman	Kaca Mata	71500	1	71500
58	LTU II/ 12m/ Sutiman	Buah-buahan	71500	1	71500
59	LTU II/ 12m/ Hanifah	Buah-buahan	71500	1	71500
60	LTU II/ 12m/ Ary Hidayat	Minyak Wangi	71500	1	71500
61	LTU II/ 12m/ Ali Zaenal M	Konveksi	71500	1	71500
62	LTU II/ 12m/ Nida Farah M	Konveksi	71500	1	71500
63	LTU II/ 12m/ H. Ach B.	Konveksi	71500	1	71500
64	LTU II/ 12m/ Siti Habibah	Konveksi	71500	1	71500
65	LTU II/ 12m/ Aslim	Konveksi	71500	1	71500
66	LTU II/ 12m/ Suparto	Konveksi	71500	1	71500
67	LTU II/ 12m/ Gusniwati	Konveksi	71500	1	71500
68	LTU II/ 12m/ M. Sudarmawa	Konveksi	71500	1	71500
69	LTU II/ 12m/ Farida	Konveksi	71500	1	71500
70	LTU II/ 12m/ Sulastri	Konveksi	71500	1	71500
71	LTU II/ 14m/ Sugio	Konveksi	91000	1	91000
72	LTU II/ 16m/ Eliyana T.	Konveksi	95000	1	95000
73	LTU II/ 16m/ Ali Mulyadi	Alat Listrik	95000	1	95000
74	LTU II/ 16m/ Sutrisno	Jilbab	95000	1	95000
75	LTU II/ 16m/ Sukarni	Konveksi	95000	1	95000
76	LTU II/ 16m/ Hidayat L.	Tekstil	95000	1	95000
77	LTU II/ 16m/ Indah SH	Emas	95000	1	95000
78	LTU II/ 16m/ Abdul Rasit	Tekstil	95000	1	95000
79	LTU II/ 16m/ Kartono	Jamur	95000	1	95000
80	LTU II/ 16m/ Setiadi L.	Perhiasan	95000	1	95000
81	LTU II/ 18m/ Rendra W.	Konveksi	97100	1	97100
82	LTU II/ 20m/ Heri Nuryanto	Perhiasan	119000	1	119000
83	LTU II/ 20m/ Moch Najib	Minyak Wangi	119000	1	119000

84	LTU II/ 20m/ Jumadi	Bawang Merah	119000	1	119000
85	LTU II/ 20m/ Dian Teguh k	Sosis	119000	1	119000
86	LTU II/ 22,5m/ Maimunatus	Sosis	145200	1	145200
87	LTU II/ 56m/ Kartono Yosep	Keramik	399.200	1	399200
88	LTU III/ 2m/ Saminah	Pracangan	2000	30	60000
89	LTU III/ 3m/ Lilik Masliha	Pracangan	3000	30	90000
90	LTU III/ 3.75m/ Rofi'I	Sepatu	4000	30	120000
91	LTU III/ 4m/ Kamiran	Pracangan	4000	30	120000
92	LTU III/ 4m/ Imam	Pracangan	4000	30	120000
93	LTU III/ 4m/ Abd Jalil	Pracangan	4000	30	120000
94	LTU III/ 4m/ H. Faturohman	Pracangan	4000	30	120000
95	LTU III/ 5.5m/ Tatik	Warung Nasi	4000	30	120000
96	LTU III/ 5.5m/ Moh Irfan	Pracangan	5000	30	150000
97	LTU III/ 6m/ Moch Mijar	Rampan	6000	30	180000
98	LTU III/ 6m/ Misjar	Pracangan	5000	30	150000
99	LTU III/ 6m/ Endin H.	Plastik	6000	30	180000
100	LTU III/ 6,25m/ khosin	Polowijo	6500	30	195000
101	LTU III/ 6,8m/ Marfu'ah	Daging Sapi	7000	30	210000
102	LTU III/ 7,5m/ Hanani	Ikan Kering	7500	30	225000
103	LTU III/ 7.5m/ Sahri	Pecah Belah	7500	30	225000
104	LTU IV/ 2m/ Mashuda	Pindang	1500	30	45000
105	LTU IV/ 3m/ W. Sudirman	Ikan Basah	2000	30	60000
106	LTU IV/ 3m/ H. Rokayah	Ikan Basah	1500	30	45000
107	LTU IV/ 3m/ Widad	Ikan Basah	2000	30	60000
108	LTU IV/ 3m/ As'ad	Ikan Basah	2000	30	60000
109	LTU IV/ 3m/ Mula Umiyati	Babat	1500	30	45000
110	LTU IV/ 4m/ H. Moch N.	Ikan Kering	2500	30	75000
111	LTU IV/ 4m/ Tri Suharyan	Kue	2000	30	60000
112	LTU IV/ 4m/ Ach Nur	Ikan Kering	2000	30	60000
113	LTU IV/ 4m/ Yuli	Telur Ayam	2500	30	75000
114	LTU IV/ 4m/ Sugiono	Mie Basah	2000	30	60000
115	LTU IV/ 5m/ H. Supatmi	Sayuran	2000	30	60000
116	LTU IV/ 5m/ Mistar	Sayuran	2000	30	60000
117	LTU IV/ 5m/ Kosim	Ikan Basah	2500	30	75000
118	LTU IV/ 6m/ Abd Munif	Sayuran	3000	30	90000
119	LTU IV/ 6m/ Anisah	Polowijo	2500	30	75000
120	LTU IV/ 6m/ Hj. Sriwahyuni	Ikan Kering	3000	30	90000
121	LTU IV/ 6m/ Bahrul Elmi	Ikan Kering	3000	30	90000
122	LTU IV/ 6m/ Soleha Nukrak	Daging Sapi	3500	30	105000
123	LTU IV/ 6m/ Satrawi	Daging Sapi	3000	30	90000
124	LTU IV/ 6m/ Faisal Rifqi B.	Daging Sapi	3000	30	90000
125	LTU IV/ 6m/ Yoga Prakasa	Daging Babi	3000	30	90000

126	LTU V/ Bakat	Bakso	2000	30	60000
127	LTU V/ Massuki	Sepatu	2000	30	60000
128	LTU V/ Halil	Krecikan	1000	30	30000
129	LTU V/ B. Marfa	Kopi	1000	30	30000
130	LTU V/ Usman	Sandal	2000	30	60000
131	LTU V/ Asis	Buah	2000	30	60000
132	LTU V/ B. Sus	Buah	2000	30	60000
133	LTU V/ Wahyu	Krecikan	2000	30	60000
134	LTU V/ Arman	Bakso	4000	30	120000
135	LTU V/ H. Nur Hari	Sate	2000	30	60000
136	LTU V/ No Name	Ayam Potong	2500	30	75000
137	LTU V/ P. Jamur	Jamur	1500	30	45000
138	LTU V/ B. Usuf	Sayuran	1500	30	45000
139	LTU V/ P. Lut dan Rahma	Sayuran	2500	30	75000
140	LTU V/ Habibi	Tempe	2000	30	60000
141	LTU V/ No Name	Ayam Potong	2500	30	75000
142	LTU V/ No Name	Cecek	1000	30	30000
143	LTU V/ Andayani	Tempe	2000	30	60000
144	LTU V/ Sugik	Kelapa	1000	30	30000
145	LTU V/ Abd. Rosid	Tempe	1500	30	45000
146	LTU V/ B. Hadi	Timun	1500	30	45000
147	LTU V/ Tiwa	Ayam Potong	2500	30	75000
148	LTU V/ B. Sur	Jagung	2500	30	75000
149	LTU V/ B. Utik	Pisang	1000	30	30000
150	LTU V/ B. Homi	Sayuran	3000	30	90000
151	LTU V/ B. Nur	Sayuran	1500	30	45000
152	LTU V/ Suharyono	Krupuk	1500	30	45000
153	LTU V/ Siti Romlah	Sayuran	2000	30	60000
154	LTU V/ Siti Munawaroh	Tempe	2000	30	60000
155	LTU V/ Soki	Ayam Potong	2000	30	60000
156	LTU V/ B. Kiki	Sayuran	1500	30	45000
157	LTU V/ P. Abbas	Ikan Asin	3000	30	90000
158	LTU V/ B. Ju	Buah	1500	30	45000
159	LTU V/ Asmini	Kelapa	1000	30	30000
160	LTU V/ B. Sam	Cao	1500	30	45000
161	LTU V/ B. Turyana	Kue	1000	30	30000
162	LTU V/ B. Lilik	Ikan Asin	1500	30	45000
163	LTU V/ Nanang	Kue	5000	30	150000
164	LTU V/ Ida dan Agus	Kue	2500	30	75000
165	LTU V/ B. Iya	MakananMinuman	1000	30	30000
166	LTU V/ Madri	MakananMinuman	1000	30	30000
167	LTU V/ Faton	Pecah Belah	500	30	15000
168	LTU V/ Mak Jamila	Bunga	3500	30	105000
169	LTU V/ Margi	Nampan	1500	30	45000
170	LTU V/ B. Sabar	Nasi	2500	30	75000

171	LTU V/ H. Atik	Empon-empon	3000	30	90000
172	LTU V/ P. Heru	Kelapa	2000	30	60000
173	LTU V/ B. Suarian	Pracangan	1000	30	30000
174	LTU V/ Nisran	Buah	1000	30	30000
175	LTU V/ Budi	Arloji	1000	30	30000
176	LTU V/ Ali Wafa	Arloji	1000	30	30000
177	LTU V/ Misdin	Arloji	1000	30	30000
178	LTU V/ H. Kamidi	Sayuran	4000	30	120000
179	LTU V/ B. Tukiran	Pracangan	1000	30	30000
180	LTU V/ Hendrik	Kelapa	2000	30	60000
181	LTU V/ P. Mat	Daging Kambing	3500	30	105000
Total pendapatan retribusi selama 1 bulan					12978000
Total pendapatan retribusi selama 12 bulan (bulan Januari s/d Desember)					155736000
					0

Dari tabel 4.15 diatas didapat dari perhitungan data empirik total pendapatan retribusi yang diperoleh dari 181 sampel pedagang, 181 sampel ini diperoleh dari 10% jumlah populasi yang ada. Sehingga hasil berhitungan tersebut dijadikan 100% hingga diperoleh perhitungan $(Rp. 155.736.000,-/10\%) \times 100\%$ maka total penerimaan retribusi untuk semua populasi adalah Rp. 1.557.360.000,-. Dari hasil tersebut dapat dicari persentasenya dengan membagi potensi yang ada dikalikan 100%, berikut hasil perhitungan persentasenya:

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi (\%)} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Potensi}} \times 100 \% \\
 &= \frac{\text{Rp. 1.557.360.000,-}}{\text{Rp. 1.274.155.650,-}} \times 100 \% \\
 &= 122,23 \%
 \end{aligned}$$

Perhitungan persentase di atas menunjukkan persentase yang diperoleh adalah 122,23%, perhitungan yang diperoleh dari data empirik. Sedangkan diperhitungan sebelumnya yaitu perhitungan dari data normatif diperoleh persentase sebesar 78,23%. Dalam data realisasi yang diperoleh dari Dinas Pasar Kabupaten Jember tahun 2014 sebesar Rp. 996.793.590,- hasil penerimaan tersebut cenderung lebih kecil dibandingkan dengan besar potensi yang di dapatkan dari perhitungan empiric

yang didapat dari data 181 pedagang yaitu sebesar Rp. 1.557.360.000,- , dapat diartikan bahwa potensi yang dimiliki oleh Pasar Tanjung sangat besar. Namun potensi yang dimiliki kurang digali secara baik dan optimal. Dilihat dari hasil perhitungan potensi retribusi pasar yang diperoleh jelas bahwa Pasar Tanjung memiliki potensi yang sangat besar dan belum tergali secara optimal dalam pengelolannya, seharusnya Pasar Tanjung bisa memperoleh penerimaan retribusi pasar lebih dari target yang ditentukan, upaya Dinas Pasar Kabupaten Jember harus lebih besar untuk menggali potensi yang dapat dihasilkan oleh Pasar Tanjung. Pemerolehan hasil penerimaan retribusi masih tidak sebanding dengan potensi yang seharusnya di dapat. Dari banyaknya toko/kios/los yang kosong, merupakan salah satu penyebab potensi kurang tergali secara maksimal, jika tempat tersebut digunakan oleh pedagang maka akan dapat menambah penerimaan retribusi di Pasar Tanjung. Perlunya peningkatan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan Pasar Tanjung, seperti petugas pemungut yang perlu adanya ketegasan dalam menarik retribusi kepada para pedagang. Selain itu pengelolaan tempat parkir dan MCK yang masih diserahkan kepada pihak swasta, penataan pasar yang kurang baik dapat menurunkan minat pembeli untuk berbelanja di pasar tradisional khususnya Pasar Tanjung. Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung belum dapat mengoptimalkan penerimaan retribusinya, dengan demikian permasalahan ini harus segera diurus dan ditanggulangi, sebab penerimaan retribusi pasar terutama Pasar Tanjung sangat berkontribusi besar terhadap penerimaan retribusi daerah Kabupaten Jember yang juga berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- a. Hasil perhitungan potensi penerimaan retribusi Pasar Tanjung tahun 2014 yang di dapat melalui hasil angket yang diberikan kepada 181 pedagang sebesar Rp. 1.557 juta sedangkan hasil realisasi penerimaan retribusi pasar

yang di dapat oleh Pasar Tanjung dalam data Dinas Pasar Kabupaten Jember tahun 2014 yaitu hanya sebesar Rp. 996 juta, hal ini menunjukkan bahwa adanya pengelolaan potensi penerimaan retribusi pasar di Pasar Tanjung Kabupaten Jember tahun 2014 yang kurang digali secara optimal seharusnya Pasar Tanjung mampu menghasilkan penerimaan retribusi pasar lebih dari yang diperolehnya.

- b. Penetapan tarif yang tidak sesuai dengan Perda yang berlaku adalah salah satu penyebab tidak tercapainya potensi penerimaan retribusi pasar yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Karena ketentuan tarif yang terdapat di Perda Nomor 4 Tahun 2011 lebih besar dibandingkan dengan tarif yang ditentukan oleh Perda Nomor 13 Tahun 2006, pemberlakuan tarif Perda Nomor 4 Tahun 2011 seharusnya sudah diberlakukan sejak tahun 2012. Namun Pasar Tanjung masih menetapkan tarif lama yaitu tarif yang berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2006.
- c. Besar potensi penerimaan retribusi Pasar Tanjung tahun 2014 menurut perhitungan potensi berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2011 sebesar Rp. 1.974 juta dan besar potensi penerimaan retribusi Pasar Tanjung berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2006 sebesar Rp. 1.274 juta, maka dari perhitungan kedua Perda tersebut dapat diperoleh besarnya potensi yang hilang di Pasar Tanjung Kabupaten Jember tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 700 juta yang menunjukkan bahwa potensi Pasar Tanjung Kabupaten Jember di tahun 2014 memiliki potensi yang cukup besar dalam hasil penerimaan retribusi pasarnya.
- d. Potensi retribusi pasar di Pasar Tanjung Kabupaten Jember tahun 2014 yang belum tergali disebabkan terutama karena kurang kesadaran dari pihak pedagang untuk membayar retribusi serta banyaknya toko/los yang masih kosong dan tidak ditempati untuk berdagang. Terdapat 393 toko/kios

yang kosong yaitu terdiri dari 7 toko/kios di lantai bawah dan 386 toko/kios di lantai atas.

- e. Lemahnya pengawasan pihak pengelola Pasar Tanjung dalam pelaksanaan tugas untuk petugas pemungut retribusi yang kurang tegas dalam melakukan penarikan retribusi kepada pedagang di Pasar Tanjung.

5.2 Saran

4.b.4.a. Perlu dilakukan penataan ulang Pasar Tanjung, berupa penempatan pedagang sedemikian rupa sehingga membuat pembeli dapat berkeliling ke semua bagian pasar untuk membeli kebutuhannya. Terutama penataan pasar dilantai atas Pasar Tanjung.

4.b.4.b. Para pedagang perlu dikelompokkan sesuai dengan jenis barang dagangannya. Sehingga ada kelompok los khusus sayuran, daging, ikan basah, ikan asin, ayam, pracangan dan lain sebagainya. Dengan demikian para pedagang mendapatkan kesempatan yang sama untuk menawarkan barang dagangannya.

4.b.4.c. Perbaikan manajemen terutama pengawasan sangatlah diperlukan Dinas Pasar maupun Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember agar tercapainya target retribusi yang ditetapkan Pemerintah Dearah Kabupaten Jember

4.b.4.d. Diharapkan juga tidak hanya perbaikan dari pihak instansi melainkan dari pihak pedagang pun seharusnya lebih meningkatkan kesadarannya untuk membayar retribusi pasar.